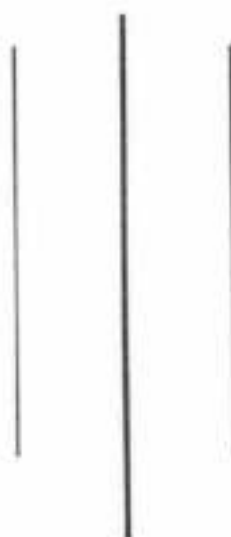




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
2020**

Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang Kode Pos 52312 Provinsi Jawa Tengah
Telp. (0284) 321029 Faks (0284) 321287
Email : lpkadkabpemalang@gmail.com



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/340 / TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa Perangkat daerah Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pematang Tahun 2021 selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 serta sebagai acuan dalam penentuan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 14 Agustus 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMATANG



Drs. M. A. HUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemasang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
 14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 serta sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada
tanggal 4 Agustus 2020



Di undangkan di
Pemalang pada tanggal
4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG;
MOHAMAD ARIFIN



BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Pemalang
29. Kecamatan Taman
30. Kecamatan Petarukan
31. Kecamatan Ampelgading
32. Kecamatan Comal
33. Kecamatan Ulujami
34. Kecamatan Bodeh
35. Kecamatan Bantarbolang
36. Kecamatan Randudongkal
37. Kecamatan Moga
38. Kecamatan Warungpring
39. Kecamatan Pulosari
40. Kecamatan Watukumpul
41. Kecamatan Belik



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan pada BPKAD Tahun anggaran 2021 yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja BPKAD Tahun 2021 dirancang berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam upaya pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

Renja Tahun 2021 tidak bergeser dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BPKAD 2016 -2021. Peningkatan Pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta kemudahan akses data menjadi tujuan BPKAD dengan sasaran peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Renja dimaksudkan untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 dan tidak terlepas dari pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya. Pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Pemalang. BPKAD merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai posisi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, mendukung misi Kabupaten Pemalang yang ke-6 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Renja sebagai salah satu dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh perangkat daerah sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan yang telah melalui tahap evaluasi dan merupakan turunan dari Renstra BPKAD 2016-2021. Renja BPKAD Tahun 2021 merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2021 yang selanjutnya akan disusun menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD Tahun Anggaran 2021 yang tetap berpedoman pada RKPD Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Pemalang, 10 Agustus 2020

KEPALA BPKAD KABUPATEN PEMALANG



Drs. M. A. PUNTODEWO,
Pembina Utama Muda
19661224 199203 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KEPUTUSAN KEPALA BPKAD NOMOR 050/ 340 / TAHUN 2020 TENTANG RENJA BPKAD TAHUN 2021	ii
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pemalang.....	30
2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD	69
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Telaah Terhadap Kebijakan Provinsi	70
3.3 Telaah Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang..	71
3.4 Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD	72
3.4.1 Tujuan BPKAD.....	72
3.4.2 Sasaran BPKAD	73
3.5 Program dan Kegiatan.....	74
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD	75
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju 2022	75
BAB IV PENUTUP	85
LAMPIRAN	86
Lampiran I	87
Lampiran II	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Penjelasan Realisasi Kegiatan di Bawah 85 %	16
Tabel 2.2 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD sampai dengan Tahun 2019	21
Tabel 2.3 : Target dan Realisasi Indikator Hasil Opini BPK atas LKD	34
Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Pematang	49
Tabel 2.5 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pematang	53
Tabel 2.6 : Pokok-Pokok Pikiran dari Pemangku kepentingan Tahun 2021	65
Tabel 3.1 : Rumusan Rencana program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pematang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana 2022	76

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 : Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dokumen perencanaan tahunan BPKAD yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pada Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai sasaran pembangunan, dengan tetap berpedoman pada Renstra BPKAD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang terjabarkan dalam program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang mempedomani arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
2. Renja merupakan acuan perangkat daerah untuk memasukkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ke dalam KUA dan PPAS serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKAD Tahun 2021;
3. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan sejauh mana capaian kinerja yang telah tercapai pada tahun tersebut serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan mendesak dan krusial pemerintah Kabupaten Pemalang pada urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang harus dipenuhi BPKAD Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 tidak jauh dengan Renja Perubahan 2020 dimana pagu anggaran per kegiatan masih dipengaruhi pelaksanaan percepatan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19) sebagai prioritas kegiatan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak terlalu menggambarkan besaran anggaran yang terfokus pada pencegahan penyebaran covid19, karena muara anggaran dalam rangka penanggulangan bencana pandemi covid19 ditampung pada Belanja Tidak Terduga yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah maka refocusing anggaran di Kabupaten Pematang Jaya selain bertujuan untuk mencegah penyebaran covid19 di Kabupaten Pematang Jaya juga bertujuan mengurangi dampak pandemi covid19 pada masyarakat antara lain yaitu :

1. Memberikan stimulus kepada UMKM yang terdampak covid19 dengan cara pemberian bantuan berupa bahan baku ataupun Bantuan Langsung Tunai.
2. Memberikan bantuan sembako ataupun Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat yang pendapatannya terdampak pandemi covid19.
3. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran covid19 di Kabupaten Pematang Jaya seperti penyediaan dana rapid tes, swab tes, masker, Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis.
4. Penyediaan dana operasional untuk pengamanan masyarakat pada saat pemberlakuan jam malam dan operasional pelayanan gugus tugas covid19.

Rencana Kerja 2021 masih dengan semangat efisiensi anggaran guna lebih memfokuskan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mempercepat penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid19 di Kabupaten Pematang Jaya beserta penanggulangan dampak pandemi covid19 di masyarakat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja-PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6). Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tercantum dalam regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 41). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa yang melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun fungsi yang diselenggarakan BPKAD dalam melaksanakan tugas tersebut adalah :

- Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyusun Rencana Kerja BPKAD Tahun 2021, senantiasa disinergikan dan disinkronisasikan dengan dokumen perencanaan yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi **“Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”** yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sesuai Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

33. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021

- a) Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran sebelumnya,
- b) Mewujudkan Sinergitas Rencana kerja Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016 – 2021.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuannya sebagai berikut:

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang terinci dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang;
- b. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan seluruh Bidang khususnya bagi pelaksana teknis Program dan Kegiatan;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja;
- d. Menjadi acuan bagi seluruh bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang karena memuat arah dan kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2021.
- e. Sebagai sarana penyesuaian atas ditetapkannya regulasi baru dalam pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPKAD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPKAD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Telaah terhadap Kebijakan provinsi
- 3.3. Telaah Terhadap Kebijakan Kabupaten Pematang
- 3.4. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD
- 3.5. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

- 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis BPKAD

Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana pencapaian kinerja suatu kegiatan kemudian mengukur tingkat pencapaian dari sisi anggaran, dengan melihat kendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya menetapkan Rencana Kerja Tahun 2021 dengan mengacu pada program yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 14 kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 7.800 surat/nota dinas;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik targetnya 4 jenis kebutuhan;
 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan target 185 unit;
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/opersional dengan target 53 unit;
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target 34 Dokumen.
 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan target untuk 4 orang;
 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan target 5 unit;
 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target 30 Jenis;
 9. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan dengan target 11 Jenis;
 10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 12 kegiatan;

11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 5 unit;
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target 12 kegiatan;
13. Penyediaan Makanan & Minuman dengan target 4 jenis;
14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan target 2 jenis;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 13 kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional dengan target 4 unit;
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 4 unit;
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target 2 unit;
4. Pengadaan Meubeleu dengan target 8 unit;
5. Pengadaan Komputer dan perlengkapannya dengan target 10 unit;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan target 2 lokal Gedung Kantor BPKAD;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target 1 unit;
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dengan Target 52 unit;
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan target 10 unit;
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target 1 unit.
11. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleu dengan target 1 kegiatan;
12. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya dengan target 20 unit;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah dengan target 1 lokal gedung;
14. Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistim informasi dengan target 2 sistem.

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan target 1 kegiatan, 10 orang.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 17 Dokumen;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan target 2 Dokumen;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 4 Dokumen;
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasi dengan target 2 Dokumen.
5. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi dengan target 3 Dokumen.
6. Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan target 48 laporan.
7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan target 20 Dokumen.

V. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan target 13 Dokumen.

VI. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 33 kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan target 1 Dokumen;
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target 1 Dokumen;
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, target 1 Raperda;
4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dengan target 1 perbup;

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan target 1 Raperda;
6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan target 1 Perbup;
7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, target 1 Raperda;
8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, target 1 Perbup;
9. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Target 1 kegiatan;
10. Sertifikasi tanah milik pemerintah Kabupaten Pematang dengan target 96 unit, 40 Sertifikat;
11. Pembayaran PBB aset daerah/BMD dengan target 78 Dokumen;
12. Pendistribusian Barang Milik Daerah dengan target 3 kegiatan;
13. Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU dengan target 5 Dokumen;
14. Penyusunan Laporan Semesteran BMD, target 4 laporan;
15. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan BMD dengan target 2 laporan;
16. Penyusunan Laporan Realisasi penerimaan BPKAD dengan target 12 laporan;
17. Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dengan target 1 dokumen;
18. Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dengan target 30 Laporan;
19. Pengelolaan Kerugian Daerah dengan target 2 Laporan;
20. Pemantauan, pemanfaatan aset/BMD dengan target 4 laporan;
21. Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) dengan target 1 laporan;
22. Pengelolaan Kas Daerah dengan target 24 Laporan;
23. Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS dengan target 2 Laporan.

24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD dengan target 4 unit;
25. Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan dengan target 2.500 SP2D;
26. Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung dengan target 3.500 SP2D;
27. Penyusunan Dokumen Penghentian Gaji PNSD dengan target 500 SKPP;
28. Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD dengan target 2.400 Dokumen;
29. Peningkatan Kompetensi Pengelola aset daerah dengan target 2 kegiatan;
30. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan target 1 aplikasi.
31. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil dan LKT dengan target 16 Laporan;
32. Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan dengan target 2.849 Dokumen;
33. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas dengan target 300 SPD;

Pencapaian realisasi anggaran pada Tahun 2019 di BPKAD sebesar Rp.19.179.089.281,00 dari anggaran sebesar Rp.20.970.212.000,00 atau 91,46%. Dari 66 Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdapat 20 Kegiatan yang capaian realisasi anggarannya dibawah 85%.

Tabel 2.1

PENJELASAN REALISASI KEGIATAN DI BAWAH 85%

KODE PROG /KEG	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2019 %		
01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran				
01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	830.000.000	570.103.164	68,69	Nilai Kontrak Jaminan Kendaraan Dinas Roda Empat dibawah HPS dikarenakan Pihak Asuransi Bumi Putera Muda 1967 Purwokerto memberikan discount harga sebesar 25%
01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	20.476.600	68,26	Sisa Anggaran merupakan sisa Harga Perolehan Barang (Belanja Modal) karena harga beli lebih kecil dari anggaran Belanja Modal
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	45.500.000	28.188.951	61,95	Terdapat Sisa Anggaran biaya service dan pembelian BBM dikarenakan kondisi kendaraan Dinas Jabatan masih baik.
02.24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	113.500.000	87.800.695	77,36	Terdapat Sisa Anggaran biaya service dan pembelian BBM dikarenakan kondisi kendaraan Dinas operasional baik roda dua maupun roda empat masih dalam kondisi baik.
06	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				

KODE PROG /KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2019	%	
06.08	Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	152.730.700	119.474.550	78,23	Sisa Anggaran merupakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak digunakan.
15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
15.03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	72.562.000	44.454.000	61,26	Sisa Anggaran merupakan efisiensi penggunaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
15.04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	226.320.000	180.795.704	79,88	Sisa Anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak digunakan
15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	107.000.000	85.344.135	79,76	Sisa Anggaran merupakan Uang Lembur PNS dan Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah yang tidak digunakan
15.16	Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	230.000.000	179.719.100	78,14	Sisa Anggaran merupakan Belanja Alat Tulis Kantor yang tidak dibelanjakan karena efisiensi.
15.22	Pendistribusian barang milik daerah	20.000.000	12.712.000	63,56	Sisa Anggaran merupakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, karena jumlah anggota tim yang ditetapkan lebih sedikit dari yang direncanakan dan tidak ada kegiatan distribusi BMD ke Perangkat Daerah lain.
15.23	Penetapan status pengguna BMD, SK pengurus barang RKB dan RKPBU	115.500.000	70.467.800	61,01	Sisa Anggaran merupakan Sisa Belanja Cetak dan Uang lembur PNS.

KODE PROG /KEG	URAIAN	JUMLAH			KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA 2019	%	
15.25	Penyelesaian pemindahtanganan penghapusan BMD dan	170.000.000	137.183.500	80,70	Sisa Anggaran merupakan sisa Belanja Jasa Lelang, dikarenakan biaya lelang kendaraan yang dikeluarkan dibawah perkiraan.
15.54	Pengelolaan kerugian daerah	118.672.000	91.223.655	76,87	Sisa Anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan BBM.
15.55	Sosialisasi/ peningkatan SDM / pengurus barang/ Simda BMD	200.000.000	85.253.876	42,63	Sisa Anggaran diakibatkan pelaksanaan sosialisasi bagi pengurus barang dilaksanakan di dalam kota sehingga Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Cetak, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Jasa Narasumber tidak terserap optimal
15.56	Pemantauan, pemanfaatan aset/ Barang milik daerah	100.000.000	56.385.000	56,39	Sisa Anggaran kegiatan ini merupakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, dan BBM karena pemantauan aset di luar daerah tidak sering dilakukan
15.57	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	280.000.000	173.715.434	62,04	Sisa Anggaran merupakan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan Laporan BMD Konsolidasi, karena jumlah anggota tim yang ditetapkan lebih sedikit dari yang direncanakan.
15.58	Pengelolaan kas daerah	115.000.000	77.174.351	67,11	Sisa Anggaran merupakan sisa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan BBM.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2019

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Akhir Renstra Perang Daerah Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target program dan Kegiatan (Rencana Perang Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perang Daerah s/d tahun 2020	
					Target Rencana Perang Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Kinerja Perang Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2019 (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d Tahun 2020 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7*9)	11=10/4
	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan									
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terperuhnya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan								
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.000	30.200	8.000	8.000	100	7.900	46.000	100
01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20	12	4	4	100	4	20	100
01	05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	830	569	205	208	100	185	830	100
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	202	96	53	53	100	53	202	100
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Daerah	184	108	42	40	99	36	184	100
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44	36	4	4	100	4	44	100
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	50	30	10	10	100	10	50	100
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	180	120	30	30	100	30	180	100

01	1.1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya rata - rata kebutuhan bahan cetak dan penggandaan (pabet, buah/lembar)	66	44	11	11	100	11	100	66	100
01	1.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik penerangan kantor (unit)	60	36	12	12	100	12	100	60	100
01	1.3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (buah)	408	393	6	5	83	6	408	408	100
01	1.5	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia koran, majalah dan buku perundang-undangan (jenis)	20	6	2	2	100	2	100	20	100
01	1.7	Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan & minuman dengan kebutuhan (jenis)	20	12	4	4	100	4	100	20	100
01	1.8	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya jumlah koordinasi & Konsultasi Luar daerah dengan kebutuhannya. (jenis)	10	6	2	2	100	2	100	10	100
02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terperluhinya kondisi Sarana dan Prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan									
02	05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional (unit)	80	80	0	0	0	0	0	0	0
02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor (unit, paket)	15	7	4	4	100	4	100	15	100
02	10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur (unit)	55	12	30	30	100	30	100	10	95
02	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terlaksananya Pengadaan komputer terhadap kebutuhan (unit)	99	38	44	44	100	44	100	99	100
02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (unit gedung)	10	6	2	2	100	2	100	10	100
02	23	Pemeliharaan rutin/ berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan (unit)	5	3	1	1	100	1	100	5	100
02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ Operasional (unit)	200	96	52	52	100	52	100	200	100
02	26	Pemeliharaan rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (unit)	165	99	30	30	100	30	100	165	100
02	28	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor (unit)	5	3	1	1	100	1	100	5	100
02	29	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan mebeleur (paket)	5	3	1	1	100	1	100	5	100

02	30	Penelitian rutin/berkala komputer dan perengkapannya	Terdalamnya pemeliharaan peralatan komputer & perengkapannya (unit)	280	150	75	75	100	55	280	100
02	45	Pembelajaran rutin / berkala software dan sistem informasi	Tersedianya Software Aplikasi sistem informasi manajemen keuangan daerah dan BMD yang dapat berjalan dengan baik (sistem jaringan)	7	3	2	2	100	2	7	100
05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diblat terhadap jumlah ASN								
05	02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi bagi ASN di BPKAD serta terlaksananya pertemuan peserta sosialisasi (orasi)	436	206	145	145	100	85	436	100
06	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia								
06	01	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ichisar realisasi kinerja SKPD (TA/PIKIN)	Tersusunnya LKJIP (Dokumen) Tersusunnya PK dan RKT (Dokumen) Tersusunnya Dokumen Pendukung SAKIP (Dokumen)	79	45	17	17	100	17	79	100
06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersusunnya laporan semesteran SKPD dan Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	6	2	2	100	2	10	100
06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan akhir tahun Pemerintah Daerah (Dokumen)	5	3	1	1	100	1	5	100
06	05	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Konsolidasian	Tersusunnya laporan semesteran dan Prognosis pemerintah daerah Konsolidasi (dokumen/laporan)	10	6	2	2	100	2	10	100
06	07	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Konsolidasian	Tersedianya Laporan Akhir tahun (dokumen)	5	3	1	1	100	1	5	100
06	08	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya laporanrealisasi pendapatan dan belanja hasil rekonsiliasi SKPD & PPKD (laporan)	120	72	24	24	100	24	120	100
06	09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya KTP Tersusunnya Dokumen Pendukung Maturitas SPIP Self Assessment Tersusunnya Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan Tersusunnya Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Tersusunnya buku kumpulan tindak lanjut LHP BPK RI	14	0	7	7	100	7	14	100

09	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	59	39	10	10	100	10	59	100
09	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	59	39	10	10	100	10	59	100
15	15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5	3	1	1	100	1	5	100
13	03	Penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	8	6	1	1	100	1	8	100
15	04	Penyusunan Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	5	3	1	1	100	1	5	100
15	06	Penyusunan rancangan Perda tentang APBD	5	3	1	1	100	1	5	100
15	07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	5	3	1	1	100	1	5	100
15	08	Penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD	5	3	1	1	100	1	5	100
15	09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	3	1	1	100	1	5	100
15	10	Penyusunan rancangan Perda tlg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	3	1	1	100	1	5	100
15	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tlg Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	5	3	1	1	100	1	5	100

15	15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya bintek tentang pengelolaan keuangan daerah (Dokumen)	5	3	1	1	100	1	5	100
15	16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Terfasilitasinya pembuatan sertifikat tanah milik Pemkab Pematang (sertifikat) Terpasangnya papan identitas tanah di atas tanah milik pemkab pematang dan dalam kondisi baik (papan)	743	442	171	169	99	132	743	100
15	21	Pembayaran PBB Asset Daerah/BMD	Terbayarnya PBB tanah milik pemda (bidang)	522	372	78	72	92	78	522	100
15	22	Pendistribusian Barang Milik Daerah (BMD)	Terlaksananya distribusi BMD (baik)	15	10	2	2	100	3	15	100
15	23	Pencapaian Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKBU dan RKPBU	Tersusunnya SK Penetapan Status Barang daerah Tersusunnya SK Pengurus barang & perubahannya Tersusunnya RKEMD dan RKPBM Tahun (Dokumen)	25	15	5	5	100	5	25	100
15	24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan BMD Semesteran Tersusunnya Laporan rekonsiliasi BMD (Laporan)	14	6	4	4	100	4	14	100
15	25	Penyelesaian Pemindahbantuan dan Penghapusan BMD	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pemindahbantuan dan Penghapusan BMD (Laporan)	10	6	2	2	100	2	10	100
15	26	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Tersusunnya laporan realisasi penerimaan BPKAD (Laporan)	84	60	12	12	100	12	84	100
15	31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Tersusunnya Perbup tentang sistem informasi Akuntansi Keuangan Daerah (dokumen)	5	3	1	1	100	1	5	100
15	35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Tersusunnya Laporan hasil pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah (Laporan)	360	300	30	30	100	30	360	100
15	54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah (Laporan)	15	11	2	2	100	2	15	100
15	56	Pemanfaatan aset/BMD	Tersusunnya Laporan Hasil pemantauan pemanfaatan aset (Laporan)	44	36	4	4	100	4	44	100
15	57	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Tersusunnya Laporan Semesteran BMD konsolidasi	5	3	1	1	100	1	5	100

15	58	Pengelolaan Kas Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi tertung pengelolan kas daerah Tersusunnya laporan mutasi deposito (Laporan)	120	72	24	24	100	24	120	100
15	59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Tersusunnya laporan bahan rancangan KUA PPAS selama satu tahun (laporan)	10	6	2	2	100	2	10	100
15	62	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPKD	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional SKPD	61	40	18	18	100	3	61	100
15	64	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembayuan	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pembayuan	27.000	16.500	5.500	5.500	100	5.000	27.000	100
15	65	Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Terlaksananya penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	18.500	9.000	5.500	5.500	100	5.000	18.500	100
15	66	Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	4.500	3.500	500	500	100	500	4.500	100
15	67	Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNSD	Terlaksananya penyusunan Dokumen pendukung Pembayaran Gaji PNSD	62.000	37.200	12.400	12.400	100	12.400	62.000	100
15	68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Terlaksananya Bimtek/Sosialisasi terhadap pengurus barang Perangkat Daerah	13	9	2	2	100	2	13	100
15	69	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya penyusunan aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	2	0	1	1	100	1	2	100
15	70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Propinsi dan LNT	Tersusunnya Laporan Realisasi Penentuan Dana Transfer dari Pusat dan Laporan Realisasi Penentuan Bagi Hasil dari Propinsi (Laporan)	108	60	24	24	100	24	108	100
15	71	Penyusunan Laporan Realisasi Penentuan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembayuan	Tersusunnya Laporan Realisasi Penentuan dan Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD, Laporan Penentuan dan Pengeluaran Pembayuan, Laporan Penyaluran Dana Desa dan Verifikasi Berfas Pembelian Belanja Tidak Langsung PPKD (Laporan)	14.249	8.400	3.000	3.000	100	2.849	14.249	100
15	72	Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas	Tersusunnya Surat Penyediaan Dana SKPD dan Anggaran Kas (Dokumen)	1.425	600	325	325	100	300	1.425	100

Penjelasan :

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp.19.179.089.281,00 dari anggaran sebesar Rp.20.970.212.000,00 atau 91,46%. Terdapat 20 kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 85% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah hanya terealisasi sebesar 68,69%. Sisa anggaran merupakan sisa premi asuransi kendaraan dinas roda empat yang disebabkan pemenang lelang(Bumi Putera Muda) memberikan discount sebesar 25%.
2. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terealisasi sebesar 31,74%. Sisa Anggaran merupakan Harga perolehan Barang (Belanja Modal) karena harga barang lebih kecil dari anggaran belanja modal di DPA.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan terealisasi sebesar 61,95%. Sisa anggaran berupa belanja service dan pembelian suku cadang kendaraan yang tidak terserap optimal disebabkan Kondisi Kendaraan Dinas (Mobil Jabatan) dalam kondisi baru/Baik.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terealisasi sebesar 77,36%. Sebagian besar kondisi kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua di BPKAD dalam kondisi baik dan pengadaan baru. Sehingga belanja service tidak terserap optimal, karena kendaraan dinas belum membutuhkan perawatan khusus.
5. Kegiatan Penyusunan Rekonsiliasi Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan realisasi 78,23%. Sisa anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang direncanakan untuk rekonsiliasi data ke masing-masing perangkat daerah.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan terealisasi sebesar 84,66%. Sisa anggaran berupa belanja perjalanan dinas dalam daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dianggarkan untuk biaya koordinasi dengan pihak Kementerian Keuangan terkait rekonsiliasi data Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan koordinasi teknis penyaluran TKDD.

7. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terealisasi sebesar 61,26%. Sisa anggaran merupakan efisiensi penggunaan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang semula direncanakan untuk koordinasi dan kunjungan terkait penyusunan kebijakan akuntansi persediaan.
8. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah terealisasi sebesar 79,88%. Hal ini disebabkan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang rencana digunakan untuk koordinasi penyusunan Nasabah Akademik Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terserap optimal.
9. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD terealisasi sebesar 79,76%. Belanja yang tidak terserap optimal adalah Belanja Lembur PNS dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah. Hal ini disebabkan karena kuantitas lembur tidak sebesar yang direncanakan dan pelaksanaan perjalanan dinas luar dalam rangka konsultasi diganti dengan penggunaan media lain.
10. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terserap sebesar 85%. Sisa anggaran berupa lembur PNS dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
11. Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang terealisasi 78,14%. Pembayaran biaya proses sertifikasi tanah milik Pemkab Pematang ke BPN tidak sesuai dengan rencana sebelumnya karena dari target 40 sertifikat yang bisa diproses ternyata hanya 39 berkas pengajuan pensertifikatan tanah yang lolos dari verifikasi BPN. Selain itu ada efisien dalam pembelian alat tulis kantor pada kegiatan ini.
12. Kegiatan Pendistribusian Barang Milik Daerah sebesar 63,56%. Sisa anggaran berupa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak direalisasikan karena tidak ada distribusi BMD ke luar Kecamatan Pematang.
13. Kegiatan Penetapan Status Pengguna BMD, SK Pengurus Barang, RKB dan RKPBU yang terealisasi sebesar 59,28%.

Sisa Anggaran merupakan belanja cetak dan uang lembur PNS.

14. Kegiatan Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD terealisasi sebesar 80,70%. Sisa anggaran merupakan Belanja Jasa Lelang, disebabkan biaya lelang kendaraan yang dikeluarkan dibawah perkiraan.
15. Kegiatan Penyusunan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terserap 85,00%. Sisa anggaran karena adanya kegiatan pendampingan implementasi aplikasi persediaan yang tertunda pelaksanaannya karena pertimbangan waktu dan kesiapan regulasi yang belum memadai.
16. Kegiatan Pengelolaan Kerugian Daerah terserap sebesar 76,87%. Sisa anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah yang rencana akan digunakan untuk melakukan koordinasi tindak lanjut TP/TGR.
17. Kegiatan Sosialisasi/Peningkatan SDM/Pengurus Barang/Simda BMD terserap 42,63%. Kegiatan ini tidak tercapai optimal karena pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan di luar kota tetapi disebabkan Personil BPKP selaku Narasumber sedang bertugas di Kabupaten Pematang maka kegiatan tersebut dilakukan di wilayah Kabupaten Pematang.
18. Kegiatan Pemantauan asset/BMD terealisasi sebesar 56,39%. Pelaksanaan kegiatan ini tidak terlalu intensif atau kuantitas kegiatan tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, sehingga terdapat sisa pada belanja perjalanan dinas luar daerah, honorarium pelaksanaan kegiatan dan belanja BBM.
19. Kegiatan Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah (konsolidasi) terealisasi sebesar 62,04%. Jumlah anggota tim pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran honorarium kegiatan.
20. Kegiatan Pengelolaan Kas daerah terealisasi 67,11%. Sisa anggaran merupakan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dan BBM yang semula direncanakan untuk koordinasi pengelolaan kas daerahtetapi tidak terserap optimal karena konsultasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan website dan WAG.

Dari sisi realisasi output, terdapat 3 kegiatan yang realisasi output kegiatannya tidak mencapai 100% yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini menargetkan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 6 jenis berupa kulkas, televisi, dispenser, CD Player, penghancur kertas dan mesin ketik elektrik. Dari 6 output tersebut, yang tidak terealisasi adalah mesin ketik elektrik karena barang sudah tidak ada di pasaran sehingga realisasi output kegiatan ini 83,33%.
2. Kegiatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang. Target output kegiatan ini adalah pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang sebanyak 40 sertifikat dan pembuatan 131 unit papan identitas tanah milik Pemkab. Pada Tahun 2019 terealisasi sebanyak 38 sertifikat dan 131 unit papan identitas tanah milik Pemkab Pemalang. Sehingga realisasi output kegiatan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang sebesar 95%
3. Kegiatan Pembayaran PBB aset daerah/BMD. Target output kegiatan ini adalah terfasilitasinya pembayaran PBB tanah milik Pemkab Pemalang sebanyak 78 SPT. Pada Tahun Anggaran 2019 hanya 72 SPT yang terbayar. Sehingga realisasi capaian output kegiatan ini sebesar 92,3%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

1. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam mencatat, membukukan dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan keuangan yang dikelolanya.
2. Menyusun petunjuk teknis, sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman perangkat daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Menyusun Rancangan Perda tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD dan Peraturan KDH tentang Perubahan Penjabaran APBD;
5. Menyusun Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
6. Menyusun Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
7. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Keuangan Daerah guna peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan daerah;
8. Melakukan upaya pengamanan aset daerah dengan sertifikasi tanah milik Pemkab Pemalang dan pemasangan papan identitas di atas tanah milik Pemkab Pemalang;
9. Melakukan pembayaran PBB atas aset tanah milik Pemkab Pemalang;
10. Menginventarisasi RKBU dan RKPBU dari masing-masing SKPD serta mendistribusikan BMD ke SKPD sesuai usulan kebutuhan;
11. Menyusun Keputusan KDH tentang Penunjukkan Pengurus Barang dan Status Pengguna Barang;
12. Menyusun Laporan Semesteran BMD selaku SKPD dan menyusun Laporan Semesteran BMD Konsolidasi selaku SKPKD serta menyusun Laporan Tahunan BMD Konsolidasi;
13. Melaksanakan pemindahtanganan dan Penghapusan BMD atas usulan SKPD dan kebijakan pengguna BMD;
14. Mengelola penerimaan sewa tanah dan gedung, penerimaan penjualan bongkaran dan penerimaan atas penjualan kendaraan dinas roda dua/empat termasuk menyusun laporan pendapatannya;
15. Melakukan Monitoring atas pemanfaatan aset daerah;
16. Menyusun regulasi terkait Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah;
17. Melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola keuangan di SKPD secara berkala;

18. Mengelola Kerugian Daerah dan memantau tindak lanjutnya sesuai ketentuan;
19. Melakukan Bimtek/Sosialisasi/Pendampingan kepada Pengurus Barang guna meningkatkan kompetensi pengurus barang selaku pengelola BMD di SKPD;
20. Mengatur ketersediaan dana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
21. Mengelola cash idle untuk meningkatkan PAD Pemkab Pematang Jaya melalui pendapatan jasa giro dan bunga deposito serta menyusun Laporan Pendapatannya secara berkala;
22. Menginventarisasi dan menyimpan bukti-bukti kepemilikan BMD, bukti-bukti penyertaan modal dan bukti-bukti penempatan deposito;
23. Menyusun Laporan sebagai bahan rancangan KUA PPAS;
24. Menerbitkan SP2D Belanja dan Pembiayaan;
25. Menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji untuk pensiun, meninggal dunia serta mutasi;
26. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kasesuai ketentuan yang berlaku;
27. Melakukan pencatatan register Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
28. Mengelola Belanja Tidak Langsung untuk pembayaran Gaji PNSD se-Kabupaten Pematang Jaya beserta tunjangan kerjanya;
29. Mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD;
30. Mengelola penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
31. Menguji kebenaran berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas Keputusan Otorisasi;
32. Mempersiapkan bahan pertimbangan pelaksanaan penyelesaian masalah perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
33. Menyusun Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya;
34. Mengelola, meningkatkan dan mengembangkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan BMD;
35. Memfasilitasi pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan untuk Perangkat Daerah.

Selain melaksanakan fungsi di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi sebagai pengelola pendapatan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun pendapatan yang termasuk dalam Lain-Lain PAD yang sah.

PAD dan Dana Perimbangan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

1. PAD

1.1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1.1.1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.1.2. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank

1.2. Lain-Lain PAD yang Sah

1.2.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan

1.2.2. Penerimaan Jasa Giro

1.2.3. Penerimaan Bunga

1.2.4. Tuntutan Kerugian Daerah

1.2.5. Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan

1.2.6. Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan

1.2.7. Penerimaan dari Pengembalian

1.2.8. Penerimaan Lain-Lain

1.2.9. Pendapatan Sewa

2. Dana Perimbangan

2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.1.1. Bagi Hasil Pajak

2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

2.3. Dana Alokasi Khusus

2.3.1. DAK Fisik

2.3.2. DAK Non Fisik

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

3.1. Pendapatan Hibah

3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

3.1.2. Pendapatan Hibah Dana BOS

3.2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 3.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- 3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3.3.1. Bantuan Keuangan dari Propinsi
- 3.4. Alokasi Dana Desa
 - 3.4.1. Alokasi Dana Desa
- 3.5. Dana Insentif Daerah
 - 3.5.1. Dana Insentif Daerah

Untuk mengevaluasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang. IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu Indikator yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 yaitu " Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah". Target dan realisasi capaian kinerja atas Indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Indikator Hasil Opini BPK atas LKD

Hasil Opini BPK atas LKD	Tahun dikeluarkannya Opini BPK RI atas LKD			
	2016	2017	2018	2019
Target	WDP	WDP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP

Adapun IKU BPKAD Kabupaten Pemalang yang mendukung Indikator RPJMD " Hasil Opini BPK atas LKD " yaitu :

1. Persentase Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD. Sesuai Pasal 104 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara

Kepala Daerah dan DPRD. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penyampaian Raperda APBD paling lambat dilakukan pada awal bulan Oktober Tahun sebelumnya. Sedangkan sesuai dengan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan. Kategori ketercapaian indikator ini adalah 100% apabila tepat waktu (TW), 50% apabila tidak tepat waktu (TTW) dan 0% apabila tidak disampaikan.

IKU BPKAD ini didukung oleh 2 indikator program yaitu :

a. Persentase Ketepatan waktu penyampaian RKA-SKPD

Penyusunan RKA/RKAP oleh SKPD merupakan bagian dari penyusunan APBD/Perubahan APBD. Apabila SKPD telah menyusun RKA/RKAP sesuai dengan ketentuan penganggaran dan selesai tepat waktu, maka hal ini akan mendorong tercapainya target kinerja dari IKU BPKAD yang pertama.

b. Persentase Ketepatan waktu penyusunan SPD

Surat Penyediaan Dana akan tersusun dan terbit tepat waktu apabila telah memenuhi indikator bahwa SPD tersebut telah mengakomodir seluruh kelompok anggaran kas yang telah ditetapkan. Penyusunan SPD sangat tergantung pada anggaran kas yang dentry SKPD ke SIMDA Keuangan pada saat menyusun RKA/RKAP SKPD. Sehingga kedua indikator program ini tidak dapat diabaikan dalam pencapaian IKU pertama BPKAD.

2. Persentase Ketepatan Waktu penerbitan SP2D.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah SP2D yang diproses dalam waktu 3 hari sejak dibuatnya SPM SKPD dibanding Jumlah berkas SP2D yang diajukan oleh SKPD. Apabila semua SKPD menyusun SPM sesuai ketentuan maka penerbitan SP2D dapat dilaksanakan sesuai ketentuan

(3 hari). Target dari IKU ini adalah 100% (tepat waktu atau 3 hari). IKU SP2D yang diterbitkan tepat waktu didukung oleh satu indikator program yaitu Ketepatan Waktu Pencairan Dana. Indikator Program Ketepatan Waktu pencairan dana diukur dengan membandingkan jumlah SP2D yang telah diterbitkan dan ditransfer dananya ke rekening penerima dibanding dengan jumlah berkas usulan pencairan dana dari SKPD dalam satu tahun anggaran.

3. Persentase Pemanfaatan Aset Daerah.

Rumusan ketercapaian indikator ini adalah jumlah aset yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan. Target dari IKU ini 90%.

IKU ini didukung 3 indikator program sebagai berikut :

a. Persentase Pengamanan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang telah diproses sertifikatnya dibanding jumlah keseluruhan tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

b. Persentase Pemindahtanganan Aset.

Rumusan ketercapaian indikator program ini adalah jumlah realisasi pemindahtanganan aset daerah dibanding jumlah aset daerah yang diusulkan SKPD untuk dipindahtangankan.

c. Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan BMD.

Laporan BMD disusun paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. IKU BPKAD ini sangat terkait dengan kinerja pengurus barang SKPD dalam penyusunan Laporan BMD. BPKAD mengupayakan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melakukan entry data ke SIMDA BMD, inventarisasi aset dan penyusunan Laporan BMD agar Laporan BMD Pemkab Pematang Jaya yang merupakan Konsolidasi dari Laporan BMD SKPD dapat disusun sesuai ketentuan (tepat waktu). Tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah akan mempengaruhi data Laporan Keuangan Daerah karena data aset merupakan bagian dari Neraca yang merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Daerah.

4. Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD. Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan kepada DPRD. IKU ini didukung satu Indikator Program yaitu ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semester Pertama. Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. BPKAD melakukan desk pada saat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, diharapkan dengan langkah ini maka Raperda pertanggungjawaban APBD dapat disampaikan kepada DPRD sesuai target atau 100% (tepat waktu).

5. Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK.

Ketentuan penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK RI di atur pada Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Indikator program yang mendukung IKU ini adalah ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Laporan keuangan

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD. Apabila SKPD telah menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu maka hal ini akan mempercepat proses penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Hasil opini dari Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPK RI pada Tahun 2019 adalah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target IKU BPKAD yang terdapat pada RPJMD telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kabupaten Pematang Jaya telah mencapai WTP sebanyak 3 tahun berturut turut yaitu WTP atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2016, LKD Tahun 2017 dan LKD Tahun 2018. Keberhasilan tersebut menjadi pemacu Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk mempertahankan prestasi tersebut pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang

No	Indikator	S/P/ atau Nasional	Indikator Program	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisa
				Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020	Tahun 2021		
1.	Persentase Ketepatan Waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD (Minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk APBD dan Minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berjalan untuk Perubahan APBD)	3	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D (3 hari sesuai SOP)	100%	Persentase Pencairan Dana tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase Pemanfaatan aset daerah (Jumlah aset daerah yang telah dimanfaatkan dibanding jumlah seluruh aset daerah yang seharusnya dimanfaatkan)	90%	Persentase Pengamanan Aset	60%	60%	60%	60%	60%	60%	55%	60%	60%	
4.	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD (bulan Juni tahun berikutnya)	100%	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK (bulan Maret tahun berikutnya)	100%	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Pemalang juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD).

Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Menetapkan Surat Pencairan Dana (SPD);
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Selaku BUD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), adapun fungsi PPKD tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tetapi BPKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut :

1. Adanya tuntutan keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dengan berlakunya regulasi tentang keterbukaan informasi tersebut mengharuskan BPKAD sebagai perangkat daerah pengelola keuangan dan aset untuk mempublikasikan keuangan dan aset yang dikelolanya kepada masyarakat sebatas informasi/data-data yang tidak termasuk dalam pengecualian. BPKAD dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam menyajikan data-data pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun langkah-langkah yang telah diupayakan oleh BPKAD dalam melaksanakan amanat tersebut adalah :
 - Mempublikasikan Perda APBD, Perda Perubahan APBD dan Perda Pertanggungjawaban APBD kepada publik melalui media masa (surat kabar) dan Website BPKAD (pemalangkab.go.id/bpkad)
 - Mempublikasikan Laporan Keuangan daerah, Ringkasan APBD, Lampiran III dan IV Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD ke Website BPKAD Kabupaten Pemalang.
 - Menyusun buku Laporan Keuangan Daerah, APBD dan Perubahan APBD serta lampiran-lampirannya untuk didistribusikan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
 - Melaksanakan sistem SP2D on line dalam pencairan dana yang bersumber dari APBD.
 - Secara berkala meng-upload kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang2 di BPKAD Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke website BPKAD. Adapun kegiatan yang di upload seperti lelang kendaraan dan alat berat, fasilitasi pengelolaan keuangan kepada perangkat daerah se-Kabupaten Pemalang, desk RKA dan RKAP, desk pendapatan dan belanja daerah, desk penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis, rapat-rapat dalam rangka penyusunan regulasi pengelolaan keuangan seperti peraturan bupati tentang TGR, Hibah Bansos, kebijakan akuntansi dan lain-lain.
2. Terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan agar optimal tetapi terkendala anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan secara

bertahap antara lain : sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang serta inventarisasi Aset/BMD. Jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang keseluruhan 1.728 bidang tanah. Luasan tersebut tidak dapat diproses serifikatnya sekaligus mengingat kemampuan keuangan daerah sehingga pensertifikatan tanah dilaksanakan bertahap. Setiap tahun ditargetkan 40 sampai dengan 50 bidang tanah untuk dilaksanakan proses sertifikasinya. Pada tahun 2020, sesuai dengan amanat dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mempercepat dan memprioritaskan proses pensertifikatan tanah untuk mencegah hilangnya aset daerah karena keterlambatan proses pengurusan bukti kepemilikan maka ditargetkan pensertifikatan tanah Pemda sebanyak 300 bidang dengan perkiraan biaya per bidangnya Rp.2.500.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang sangat concern terhadap pengelolaan BMD.

Dalam hal inventarisasi aset, masalah yang dihadapi adalah kompetensi SDM Pengurus barang. Sebagian besar pengurus barang belum memahami pengelolaan BMD sesuai Pedoman Pengelolaan BMD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 khususnya ketentuan tentang kodifikasi barang daerah. BPKAD khususnya Bidang Akuntansi dan Aset Daerah berupaya melaksanakan bimtek, sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus barang SKPD dalam melaksanakan inventarisasi BMD dan entry data BMD ke SIMDA BMD. Selain kompetensi SDM pengurus barang, hal lain yang menjadi kendala adalah sering bergantinya personil pengurus barang SKPD sehingga mengakibatkan tidak optimalnya laporan barang yang menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain faktor anggaran dan SDM, terdapat faktor lain yaitu pengiriman data aset dari SKPD sering terlambat. Hal ini mengakibatkan banyak aset Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum terbayar PBB dan asuransinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPKAD telah melakukan langkah - langkah sebagai berikut :

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke semua perangkat daerah di Kabupaten Pemalang dalam rangka rekonsiliasi data aset yang tercatat di KIB SKPD dengan SIMDA BMD.

- Melaksanakan cek fisik dan cek lapangan atas data aset yang tercatat pada KIB SKPD.
 - Melaksanakan Bimbingan teknis kepada pengurus barang tentang pengelolaan Barang Milik Daerah terkait pencatatan, pelaporan, penghapusan dan pertanggungjawabannya.
 - Meng-upgrade versi Simda BMD agar lebih kompatibel sebagai aplikasi pendukung penyajian data aset daerah.
3. Penyusunan APBD dan Laporan Keuangan Daerah membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara on line. BPKAD telah mengambil langkah solusi untuk permasalahan tersebut yaitu :
- Pemeliharaan sistem dan jaringan SIMDA Keuangan serta SIMDA BMD secara berkala. BPKAD bekerjasama dengan BPKP dalam pemeliharaan aplikasi SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD. Secara berkala aplikasi tersebut di up grade dan disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan pelaporan keuangan dan aset daerah. Dari sisi jaringan, BPKAD bekerja sama dengan pihak PT Lawang Sewu. BPKAD menandatangani MOU dengan PT Lawang Sewu untuk penggunaan jaringan Cloud atas SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sehingga kedua aplikasi tersebut dapat digunakan secara online oleh semua SKPD dimana pun dan kapan pun. Sebagai pendukung penggunaan cloud, BPKAD bekerjasama dengan pihak PT Telkom dalam penyediaan konektivitas internet yang memadai.
 - BPKAD menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi SKPD yang melakukan entry data anggaran maupun realisasi di ruang komputer BPKAD. Peningkatan fasilitas tersebut berupa peningkatan jaringan internet dengan menggunakan FO, penggunaan server khusus/tersendiri di ruang komputer dan penyediaan komputer PC all in one dengan spesifikasi yang cukup.
 - Dalam rangka mengantisipasi mutasi pejabat struktural pada tataran teknis pengelolaan aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah maka BPKAD menyusun manual book tentang

cara mengoperasionalkan SIMDA Keuangan, agar pejabat yang menggantikan dapat meneruskan program yang telah direncanakan oleh pejabat sebelumnya, dengan cara mempedomani buku tersebut.

- Bekerjasama dengan BAPPEDA dan Diskominfo, BPKAD berniat mengimplementasikan e-budgeting dalam pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan e-planning (SIMDA Integrated) yang ada di BAPPEDA.

Analisis SWOT (*Streghths, Weakness, Opportunities, Threats*):

Kerjasama Organisasi antar bidang tidak dapat dipisahkan baik internal maupun eksternal sedangkan keberhasilan atau kegagalan organisasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Selera selalu menyesuaikan diri dan berupaya tetap dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang baik internal maupun eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan Program yang telah direncanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk menggunakan metode analisis SWOT, terdiri dari 4 Strategi :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi meminimalisir kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
4. Strategi memperkecil kelemahan untuk mengatasi ancaman.

A. Kekuatan (*Strengths*), berupa:

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan kelembagaan organisasi dalam Program dan kegiatan maupun pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain:

- Adanya Peraturan Perundang-Undangan nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Himpunan Peraturan Bupati Pemalang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Regulasi tersebut merupakan pedoman bagi semua perangkat daerah sebagai komponen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk bergerak dan melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mendukung visi misi Kabupaten Pemalang. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang digunakan sebagai petunjuk secara teknis operasional bagi seluruh personil BPKAD Kabupaten Pemalang;
- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memadai dalam rangka menjalankan Organisasi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai merupakan modal bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh semua unsur Pemerintah Kabupaten Pemalang, merupakan target yang harus dicapai setiap tahun oleh ASN sebagai bentuk output dari kinerja personal pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Adanya koordinasi serta jaringan komunikasi kerja terhadap lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas, tersedianya anggaran untuk melaksanakan Program dan Kegiatan serta motivasi dan kemauan kerja yang tinggi.

B. Kelemahan (*Weakness*), berupa:

- Koordinasi Internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas yang kadang masih kurang;
- Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Masih adanya pembagian tugas pekerjaan yang belum proporsional, penempatan pegawai yang kurang memperhatikan kompetensi, kemampuan dan ketrampilan;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Keuangan/Akuntansi;
- Kurangnya koordinasi pada masing-masing bidang;
- Masih adanya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum bersertifikat.
- Masih terdapat kelemahan pada SIMDA BMD yang belum terintegrasi secara optimal dengan SIMDA Keuangan.

C. Peluang (*Opportunities*), berupa:

- Terjalinnnya kinerja yang baik dengan mitra kerja yaitu pihak perbankan, BUMD, KPPN, Kementerian Keuangan dan pihak lainnya;
- Dukungan yang baik dan positif dari publik terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- Tuntutan dari masyarakat dalam hal keterbukaan informasi menjadi motivasi kerja BPKAD untuk selalu berinovasi dan berkinerja atas dasar regulasi dan ketentuan yang berlaku.
- Tercapainya opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" dalam tiga tahun berturut-turut atas LKD Tahun 2016, 2017 dan 2018. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan reliable.

D. Tantangan (*Threats*), berupa:

- Mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara umum sehingga perlu penterjemahan dan penafsiran teknis yang dituangkan dalam regulasi

yang merupakan kebijakan lokal pemerintah Kabupaten Pematang Jaya berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terkait dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah menuntut respon yang cepat untuk menyesuaikan urusan program kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2021 agar sesuai regulasi tersebut serta upgrade sistem/aplikasi pengelolaan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang selama ini digunakan dalam penyusunan KUA PPAS, RKPD, RKA/RKAP/DPA/DPPA;
- Beban tugas pekerjaan semakin meningkat sebanding dengan tuntutan kinerja dan output yang optimal;
- Masih banyak pelaksana yang belum menguasai akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Adanya fungsi BPKAD selaku PPKD yang mengelola anggaran hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada desa, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang melibatkan perangkat daerah lain sebagai pengampunya, dalam merealisasikan anggaran belanja tidak langsung PPKD dan pengeluaran pembiayaan. Kondisi ini membutuhkan kompetensi yang memadai, kemampuan berkoordinasi yang baik, ketrampilan dalam memahami regulasi terkait, menterjemahkan realita atau kondisi sebenarnya yang membutuhkan solusi agar sinkron antara penganggaran, peruntukkan dan realisasi belanja.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pematang Jaya terpilih periode 2016-2021 adalah **"Terwujudnya Pematang Jaya Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera"**, dengan Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari seluruh kegiatan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Pematang Jaya, yang terkait secara langsung dalam tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah misi ke 6 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

Berdaulat, terkait dengan visi ini, BPKAD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola keuangan dan aset daerah secara utuh sesuai regulasi yang berlaku.

Berjati diri, bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Walaupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali melibatkan perangkat daerah lain tetapi pelaksanaan kegiatan diupayakan selalu dalam koridor kewenangannya.

Mandiri, hal ini sudah dilakukan dalam bentuk kegiatan pengelolaan pendapatan lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan BPKAD selaku SKPD. Pendapatan tersebut berupa pengelolaan sewa aset berupa tanah dan gedung, penjualan bahan-bahan bekas bongkaran dan hasil penjualan kendaraan dinas roda empat maupun roda dua. Selain itu, BPKAD mengelola pendapatan yang masuk dalam pendapatan BPKAD selaku PPKD yaitu berupa pengelolaan pendapatan jasa giro pemegang kas, jasa giro kas daerah dan pendapatan bunga deposito atas cash idle di RKUD Kabupaten Pematang Jaya.

Walaupun pengaruh pendapatan lain-lain PAD yang sah yang dikelola BPKAD selaku SKPD serta Pendapatan Jasa giro dan Bunga Deposito yang dikelola oleh BPKAD selaku PPKD secara keseluruhan pengaruhnya

tidak signifikan terhadap pencapaian target PAD Kabupaten Pematang Jaya, tetapi hal ini telah menunjukkan upaya kemandirian dalam keuangan.

Sejahtera, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah bertujuan meningkatkan kinerja BPKAD dalam mendukung visi misi Kabupaten Pematang Jaya yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberpihakan anggaran pada kebutuhan masyarakat, peningkatan penyediaan dan perbaikan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum yang memadai merupakan peran BPKAD dalam turut andil mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan keuangan secara profesional dan optimal dalam rangka mencukupi kebutuhan tersebut. Faktor-Faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya pada tahun 2019 :

Faktor Penghambat :

1. Jumlah aset milik Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang dapat dikelola dalam bentuk sewa tanah dan gedung belum terinventarisir secara optimal karena faktor kurangnya SDM, sehingga perolehan pendapatan sewa tidak optimal dan tidak dapat mendukung peningkatan PAD dengan nilai yang signifikan. Hal tersebut menimbulkan potensi hilangnya pendapatan sewa.
2. Terbatasnya jumlah uang daerah dalam bentuk cash idle yang dapat didepositokan dalam jangka waktu tertentu dalam tahun berjalan sehingga perolehan deposito dan jasa giro pun tidak dapat mencapai nilai yang signifikan dalam mendukung peningkatan PAD.
3. Adanya aset daerah berupa tanah yang belum bersertifikat menimbulkan kemungkinan hilangnya aset daerah tersebut karena belum jelas kepemilikannya.
4. Inventarisasi aset Daerah dalam SIMDA BMD belum dapat terkoneksi secara langsung dengan SIMDA Keuangan karena kedua aplikasi tersebut belum terintegrasi.

Faktor Pendorong :

1. Adanya dana perimbangan dari pusat, Untuk mendukung pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
2. Sarana dan Prasarana yang Memadai, Mempermudah dan memperlancar pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan.
3. Semangat dan Disiplin Kerja dari ASN diBPKAD Kabupaten Pemalang, dapat mendorong upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun SKPD lain secara optimal.
4. Adanya Peluang peningkatan kompetensi bagi pelaksana BPKAD Kabupaten Pemalang dengan mengikuti Bimbingan Teknis. Dengan adanya kesempatan ini membuka peluang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPKAD Kabupaten Pemalang dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Isu-Isu Strategis merupakan hal-hal penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan yang direncanakan. Upaya keras yang baik berdampak pada efisiensi pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat kualitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditingkatkan lagi mengingat masih adanya tenaga kontrak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kerja, berinovasi dan penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat disusun laporan yang akuntabel.
- c. Tingkat koordinasi baik internal maupun eksternal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam penyusunan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Aset Daerah perlu selalu ditingkatkan dengan pelaksanaan pendampingan kepada perangkat daerah, monitoring dan evaluasi hasil inventarisasi aset pada perangkat daerah serta segera dilaksanakan integrasi SIMDA BMD dan SIMDA Keuangan agar dapat disajikan laporan aset yang akuntabel dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

- e. Profesionalisme dan disiplin aparatur daerah, kemampuan memfasilitasi, melayani dan mencari solusi merupakan faktor yang penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berkelanjutan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel 2.5 ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan analisis kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Pemalang

Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Citin Ptg
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			9.220.500.000				9.220.500.000		
4	04	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan			9.220.500.000				9.220.500.000		
4	04	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	2.652.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	2.652.000.000		
4	04	1	Jumlah surat/mo/din yang masuk dan yang terkirim dalam satu tahun	7.800 surat/mo/din	30.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/mo/din yang masuk dan yang terkirim dalam satu tahun	7.800 surat/mo/din	30.000.000		
4	04	2	Jumlah jemas jasa komunikasi, air, listrik dan internet yang dibayar dalam satu tahun	4 jenis	725.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jemas jasa komunikasi, air, listrik dan internet yang dibayar dalam satu tahun	4 jenis	725.000.000		
4	04	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	185 unit	830.000.000	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah BMD yang dijaminakan	185 unit	830.000.000		
4	04	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perantara kendaraan dinas/operasional	53 Unit	22.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perantara kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diproses perijinannya	53 Unit	22.000.000		

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Cm Pg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan / Bidang / Urusan / Nama Program / Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 04 1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara yang disusun selama satu tahun Jumlah Laporan Belanja Langsung BPKAD Jumlah publikasi Data, Informasi dan kegiatan kepada Publik melalui Website BPKAD	18 SK Bupati, 12 laporan, 4 kegiatan	90.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA, KPA dan Bendahara yang disusun selama satu tahun Jumlah Laporan Belanja Langsung BPKAD Jumlah publikasi Data, Informasi dan kegiatan kepada Publik melalui Website BPKAD	18 SK Bupati, 12 laporan, 4 kegiatan	90.000.000	
4 04 1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kerapuhan kantor	4 orang	85.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kerapuhan kantor	4 orang	85.000.000	
4 04 1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	5 unit	15.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	5 unit	15.000.000	
4 04 1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia selama satu tahun	30 Jenis	90.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia selama satu tahun	30 Jenis	90.000.000	
4 04 1	11	Penyediaan barang cetakan dan pengunggahan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan selama satu tahun	11 jenis	50.000.000	Penyediaan barang cetakan dan pengunggahan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan selama satu tahun	11 jenis	50.000.000	
4 04 1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kegiatan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKAD dan kegiatan perbaikan jaringan listrik selama satu tahun	12 kegiatan	10.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kegiatan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKAD dan kegiatan perbaikan jaringan listrik selama satu tahun	12 kegiatan	10.000.000	
4 04 1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama satu tahun	5 unit	150.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama satu tahun	5 unit	150.000.000	

Rancangan Awal EKPO				Hasil Analisis Seburuban				Crm Pg		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatorif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	1	15	2 jenis	15.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan buku peraturanperundang- undangan yang disediakan selama satu tahun.	Jumlah jenis bahan bacaan dan buku peraturanperundang- undangan yang disediakan selama satu tahun	12 kegiatan	15.000.000	
4	04	1	17	4 jenis	120.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis makanan & minuman pegawai yang disediakan selama satu tahun	4 jenis	120.000.000	
4	04	1	18	2 jenis	450.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & keluar daerah	Jumlah jenis perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam atau keluar daerah selama satu tahun	2 jenis	450.000.000	
4	04	2	2	100%	1.052.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.052.000.000
4	04	2	5	4 unit	100.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPKAD dalam satu tahun	4 unit	100.000.000	
4	04	2	7	4 unit	32.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	4 unit	32.000.000	
4	04	2	9	2 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dalam Satu tahun	2 unit	50.000.000	
4	04	2	10	8 unit	40.000.000	Pengadaan mebeur	Jumlah pengadaan meubeler selama satu tahun	8 unit	40.000.000	
4	04	2	11	10 unit	200.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah pengadaan komputer dan perlengkapannya	10 unit	200.000.000	

Monev Awal RKPD										
Hasil Analisis Kebutuhan										
Kode Urusan	Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TARGET CAPAIAN KINERJA	Pagu Indikator	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana	Catn Png
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 04	2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor BPKAD yang dipelihara selama satu tahun	2 unit	250.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor BPKAD yang dipelihara selama satu tahun	2 unit	250.000.000	
4 04	2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara selama satu tahun	1 unit	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara selama satu tahun	1 unit	50.000.000	
4 04	2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama satu tahun	52 unit	120.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama satu tahun	52 unit	120.000.000	
4 04	2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	10 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	10 unit	20.000.000	
4 04	2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	1 unit	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	1 unit	15.000.000	
4 04	2 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	Jumlah mebelur yang dipelihara selama satu tahun	1 paket	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebelur	Jumlah mebelur yang dipelihara selama satu tahun	1 paket	5.000.000	
4 04	2 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perengkapannya	Jumlah komputer dan perengkapannya yang dipelihara selama satu tahun	20 unit	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perengkapannya	Jumlah komputer dan perengkapannya yang dipelihara selama satu tahun	20 unit	20.000.000	
4 04	2 38	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Jumlah gedung kantor aset milik pembuat yang dipelihara selama satu tahun	1 unit	120.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolaan aset daerah	Jumlah gedung kantor aset milik pembuat yang dipelihara selama satu tahun	1 unit	120.000.000	
4 04	2 45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah software/aplikasi dan sistem informasi yang dipelihara selama satu tahun	2 sistem aplikasi	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah software/aplikasi dan sistem informasi yang dipelihara selama satu tahun	2 sistem aplikasi	30.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Ctm Pig		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Uraian/Isi/Isi Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatorif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	320.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	320.000.000	
4	04	5	2	70 orang	320.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah personal yang dikirim untuk mengikuti Siatek/Sosialisasi/Works hop/Seminar/Diklat	70 orang	320.000.000	
4	04	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	346.500.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	346.500.000	
4	04	6	1	17 dokumen	10.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan yang disusun Jumlah Dokumen penyukung SAKIP yang disusun Jumlah LKIP BPKAD yang disusun	17 dokumen	10.000.000	
4	04	6	2	2 dokumen	5.500.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan BPKAD semesteran dan Prognosanya	2 dokumen	5.500.000	
4	04	6	4	4 dokumen	20.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan BPKAD dan PPKD akhir tahun yang disusun Jumlah LKIP BPKAD yang disusun Jumlah LPPD yang disusun	4 dokumen	20.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Ctm Pig		
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04 6	5	4	5	50.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Jumlah laporan keuangan Daerah, semesteran dan progresnya (Konsolidasi)	14 dokumen	50.000.000	
4	04 6	7	4	3 dokumen	161.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasi yang disusun	3 dokumen	161.000.000	
4	04 6	8	4	48 laporan	80.000.000	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan hasil rekonsiliasi yang disusun	48 laporan	80.000.000	
4	04 6	9	4	20 dokumen	20.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan evaluasi RKPD Triwulanan Jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Jumlah Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Jumlah rekomendasi BPK atas temuan pemeriksaan yang ditindak lanjut BPKAD	20 dokumen	20.000.000	
4	04 9	9	4	100%	30.000.000	Program pengkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Prosentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	100%	30.000.000	
4	04 9	2	4	13 dokumen	30.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah Rencana dan Renja BPKAD yang disusun Jumlah RKA/KKAP dan DPA/DPPABPKAD/PPKD	13 dokumen	30.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Pg		
Kode Urusan	Kode Program Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikasi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	15	<p>Persentase Ketepatan waktu penyampaian RKA SKPD</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan SPD</p> <p>Persentase Ketepatan waktu pencairan dana</p> <p>Persentase pengamanan aset daerah</p> <p>Persentase pemindahtanganan aset daerah</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester pertama</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>60%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>4.820.000.000</p>	<p>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Persentase Ketepatan waktu penyampaian RKA SKPD</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan SPD</p> <p>Persentase waktu pencairan dana</p> <p>Persentase pengamanan aset daerah</p> <p>Persentase pemindahtanganan aset daerah</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester pertama</p> <p>Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>60%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>4.820.000.000</p>	
4	04	15	<p>Jumlah Perbup tentang Kebijakan Abstraksi Pemerintah yang disusun</p>	<p>1 perbup</p>	<p>45.000.000</p>	<p>Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah</p>	<p>Jumlah Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah yang disusun</p>	<p>1 perbup</p>	<p>45.000.000</p>	
4	04	15	<p>Jumlah Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBD yang disusun</p>	<p>1 Perbup</p>	<p>170.000.000</p>	<p>Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah</p>	<p>Jumlah Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBD yang disusun</p>	<p>1 Perbup</p>	<p>170.000.000</p>	
4	04	15	<p>Jumlah Raperda tentang APBD yang disusun</p>	<p>1 Raperda</p>	<p>400.000.000</p>	<p>Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD</p>	<p>Jumlah Raperda tentang APBD yang disusun</p>	<p>1 Raperda</p>	<p>400.000.000</p>	

Rancangan Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerjanya	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerjanya	Kebutuhan Dana	Cttn Pig			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4 04	15 7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang disusun	1 Raperbup	90.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang disusun	1 Raperbup	90.000.000				
4 04	15 8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD yang disusun	1 Raperda	400.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD yang disusun	1 Raperda	400.000.000				
4 04	15 9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	1 Raperbup	90.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	1 Raperbup	90.000.000				
4 04	15 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Raperda	380.000.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Raperda	380.000.000				
4 04	15 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Raperbup	75.000.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Raperbup	75.000.000				

Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Rencana Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan				Ctn Pg
			Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04 15 15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan BinteK/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan SKPD yang dilaksanakan	1 kegiatan	150.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan BinteK/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan SKPD yang dilaksanakan	1 kegiatan	150.000.000	
4	04 15 16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Jumlah sertifikasi tanah aset daerah dan pemasangan papan identitas aset daerah yang dilaksanakan	40 sertifikat, 96 papan identitas	215.000.000	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Jumlah sertifikasi tanah aset daerah dan pemasangan papan identitas aset daerah yang dilaksanakan	40 sertifikat, 96 papan identitas	215.000.000	
4	04 15 21	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Jumlah PBB tanah aset milik Pemkab Pemalang yang dibayar	78 dokumen	40.000.000	Pembayaran PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Jumlah PBB tanah aset milik Pemkab Pemalang yang dibayar	78 dokumen	40.000.000	
4	04 15 22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan kegiatan distribusi BMD yang dilaksanakan selama satu tahun	3 laporan	10.000.000	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan kegiatan distribusi BMD yang dilaksanakan selama satu tahun	3 laporan	10.000.000	
4	04 15 23	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RAKBU dan RKPBU	Jumlah Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang yang disusun Jumlah SK Penetapan status pengguna BMD, RAKBU dan RKPBU selama satu tahun	5 Dokumen	75.000.000	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RAKBU dan RKPBU	Jumlah Keputusan Bupati tentang penunjukkan pengurus barang yang disusun Jumlah SK Penetapan status pengguna BMD, RAKBU dan RKPBU selama satu tahun	5 Dokumen	75.000.000	
4	04 15 24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran BMD dan Laporan Rekonsiliasi BMD	4 laporan	10.000.000	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran BMD dan Laporan Rekonsiliasi BMD	4 laporan	10.000.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Uraian / Bidang Urusan / Nama Program / Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatorif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	Catn Pig
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04	15	25	2	75.000.000	Penyelesaian Pemindahbantuan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan pemindahbantuan dan penghapusan BMD dalam satu tahun	2 laporan	75.000.000	
4	04	15	26	12	5.000.000	Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Jumlah laporan realisasi penerimaan BPKAD dalam satu tahun	12 laporan	5.000.000	
4	04	15	31	1	50.000.000	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah	1 dokumen	50.000.000	
4	04	15	35	30	60.000.000	Peningkatan kapasitas aparatut pengelola keuangan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD	30 laporan	60.000.000	
4	04	15	54	2	50.000.000	Pengelolaan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	2 laporan	50.000.000	
4	04	15	56	4	70.000.000	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan Aset Daerah	4 laporan kegiatan pemantauan	70.000.000	
4	04	15	57	1	165.000.000	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Jumlah Laporan Semesteran BMD (konsolidasi)	1 laporan	165.000.000	

Rencana Awal RKPD										Hasil Analisis Kebutuhan			
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	Ciri Ptg			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	04	15	58	24 laporan	70.000.000	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Laporan Mutasi Deposito	24 laporan	70.000.000				
4	04	15	59	2 laporan	80.000.000	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Jumlah Laporan Rancangan KUA PPAS selama satu tahun	2 laporan	80.000.000				
4	04	15	62	4 unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk SKPD	4 unit	1.000.000.000				
4	04	15	64	2.500 dokumen	100.000.000	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembayasan	Jumlah SP2D Belanja Langsung dan Pembayasan yang diterbitkan	2.500 dokumen	100.000.000				
4	04	15	65	3.500 dokumen	150.000.000	Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan	3.500 dokumen	150.000.000				
4	04	15	66	500 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Pengurusan Pembayaran Gaji PNSD	Jumlah dokumen Pengurusan pembayaran gaji PNSD yang diterbitkan	500 dokumen	25.000.000				
4	04	15	67	12.400 dokumen	140.000.000	Penyusunan dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	Jumlah dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD yang diterbitkan	12.400 dokumen	140.000.000				

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
Kode Urusan	Kode Program / Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Nama Program/ Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana	Ctun Pug
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	04 15 68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi pengelola aset daerah yang dilaksanakan	2 kegiatan	175.000.000	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi pengelola aset daerah yang dilaksanakan	2 kegiatan	175.000.000	
4	04 15 69	Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah aplikasi yang dibuat dalam rangka peningkatan dan pengembangan system pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 aplikasi	300.000.000	Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan keuangan dan aset daerah	Jumlah aplikasi yang dibuat dalam rangka peningkatan dan pengembangan system pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 aplikasi	300.000.000	
4	04 15 70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil dan L&T	Jumlah laporan Realisasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Jumlah Laporan Realisasi Dana Transfer dari pusat (L&T)	16 laporan	40.000.000	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil dan L&T	Jumlah laporan Realisasi Perencanaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Jumlah Laporan Realisasi Dana Transfer dari pusat (L&T)	16 laporan	40.000.000	
4	04 15 71	Penyusunan laporan realisasi perencanaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembayuan	Jumlah laporan perencanaan PPKD dan Perencanaan Pembayuan yang disusun Jumlah Laporan Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD yang disusun Jumlah berkas pengajuan pencadangan ETL PPKD dan Pembayuan yang diverifikasi	2.849 dokumen	75.000.000	Penyusunan laporan realisasi perencanaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembayuan	Jumlah laporan perencanaan PPKD dan Perencanaan Pembayuan yang disusun Jumlah Laporan Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD yang disusun Jumlah berkas pengajuan pencadangan ETL PPKD dan Pembayuan yang diverifikasi	2.849 dokumen	75.000.000	
4	04 15 72	Penerbitan SFD dan Anggaran Kas	Jumlah SFD dan Anggaran kas Perangkat Daerah yang diterbitkan	300 dokumen	40.000.000	Penerbitan SFD dan Anggaran Kas	Jumlah SFD dan Anggaran kas Perangkat Daerah yang diterbitkan	300 dokumen	40.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola Belanja Tidak Langsung PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/Musrenbangkel). Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbangdes/musrenbangkel diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbangkec diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten (MusrenbangKab) untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 terdapat 1 (satu) usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam renja BPKAD selaku SKPD. Sedangkan BPKAD selaku PPKD, mengakomodir 51 usulan masyarakat melalui Belanja Tidak Langsung PPKD atau Belanja Non Program. Adapun rincian usulan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Pokok-Pokok Pikiran dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Mobil Operasional DPD LDII Kabupaten Pemalang	Kec Pemalang		1 unit	BPKAD
2	Rabat Beton Jalan Penghubung dusun Krajan dengan dusun Pulosari di Desa Suru	Kec Bantarbolang		300x3x0,2 meter	PPKD
3	Bantuan Rehab Masjid Al Falah dusun Clapar desa Karanganyar	Kec Bantarbolang			PPKD
4	Bantuan Rehab Mushola Baitus Salam Desa Pegiringan RT.8 RW.4 Bantarbolang	Kec Bantarbolang			PPKD

5	Rehab Masjid Ash Sholihin RT.05 RW.02 desa Wonogiri	Kec Ampelgading			PPKD
6	Pembangunan Masjid RT.02 RW.10 desa Banyumudal	Kec Moga			PPKD
7	TPQ Nur Sidiq Kalibaros RT.01/10 desa Taman	Kec Taman			PPKD
8	MT Jamiyah Nur Mukmin Kalibaros RT.01 RW.10 desa Taman	Kec Taman			PPKD Musho la N
9	TPQ Nurul Barokah RT.01/09 desa Taman	Kec Taman			PPKD
10	Madin Nurul Huda RT.01/09 desa Taman	Kec Taman			PPKD
11	Mushola Nur Hidayah RT.01 Rw.08 desa Taman	Kec Taman			PPKD
12	MT Khusnul Khotimah Rt.02 Rw.08 desa Taman	Kec Taman			PPKD
13	TPQ Nurul Hidayah RT.03/07 desa Taman	Kec Taman			PPKD
14	MT Nurul Hidayah RT.03/07 desa Taman	Kec Taman			PPKD
15	Masjid Al Islah Taman Asri desa Taman	Kec Taman			PPKD
16	TPQ Al islah Taman Asri desa Taman	Kec Taman			PPKD
17	MT Arrohmah Taman Asri desa Taman	Kec Taman			PPKD
18	Podok Prsantren Ribatul Mutaalimin Jl. Kolonel Sugiono Taman	Kec Taman			PPKD
19	TPQ Al Mubarak Jl. Pergiwo Taman	Kec Taman			PPKD
20	Masjid Baitul Makmur Jl. Kolonel Sugiono Taman	Kec Taman			PPKD
21	PAUD Terpadu berbaur RT.02 RW.05 Taman Asri	Kec Taman			PPKD
22	Mushola Baitul Karim RT.03 RW.05 Pengadegan Pener Taman	Kec Taman			PPKD

23	MT Al Mukhlisin Jl. Manggar RT.02/05 Akromudin Wanarejan Utara	Kec Taman			PPKD
24	MT Sabilurrohmah Jl. Cempaka RT.05/05 Akromudin Wanarejan Utara	Kec Taman			PPKD
25	MT Al Falah Jl. Asparagus RT.04/04 Slatri Wanarejan Utara	Kec Taman			PPKD
26	TPQ Nurul Islam Jl. Cempaka RT.01/01 Wanarejan Utara	Kec Taman			PPKD
27	Masjid Jumbuh Jl. Jenderal Sudirman Wanarejan Utara	Kec Taman			PPKD
28	Mushola Baiturrohimi Peklindungan Wanarejan Utara	Kec Taman			PPKD
29	Madrasah Watalimil Islam RT.03/06 Wanarejan Selatan	Kec Taman			PPKD
30	TPQ Watalimil Islam RT.03/06 Wanarejan Selatan	Kec Taman			PPKD
31	MT Mustaqim Ulul Sarwodadi RT.01/02 Cibelok	Kec Taman			PPKD
32	Rukun Kematian Margo Rukun RW.05 desa Cibelok	Kec Taman			PPKD
33	Mushola Baitul Hasanah RT.04/05 Cibelok	Kec Taman			PPKD
34	MT At Tasyakur RT.03/05 desa Pedurungan	Kec Taman			PPKD
35	Madrasah Raodhatul Hikmah Jl. Raya Gondang desa Gondang	Kec Taman			PPKD
36	RA Raodhatul Athfal RT.12/03 desa Gondang	Kec Taman			PPKD
37	Mushola Sirojul Jannah RT.02/01 desa Sitemu	Kec Taman			PPKD
38	Madrasah Raodhatul Falah RT/04/03 No.10 dusun Treban desa Jrasah	Kec Taman			PPKD
39	MT Al Wusthoniah RW.06 desa Kaligelang	Kec Taman			PPKD

40	Mushola Al Wafid GLA 2 RT.01/06 Taman	Kec Taman			PPKD
41	Mushola Baitussyaadah RT.01/01 desa Kejambon	Kec Taman			PPKD
42	TPQ Nurul Huda RT.01/01 desa Kejambon	Kec Taman			PPKD
43	MT Adz Dzikru RT.07/04 Kauman Sokawangi	Kec Taman			PPKD
44	KB Muslimat NU Nurul Huda RT.25 RW.11 Karangtalok	Kec Ampelgading			PPKD
45	KB Muslimat NU RT.04 RW.04 Ampelgading	Kec Ampelgading			PPKD
46	TK Muslimat NU RT.27 RW.05 Kebagusan Ampelgading	Kec Ampelgading			PPKD
47	TPQ Nurul Yaqin RT.04 RW.11 Kebojo Petarukan	Kec Petarukan			PPKD
48	SMK Adias Jl. Pemuda No.49 Pemalang	Kec Pemalang			PPKD
49	STIE Assholeh Jl. Sindoro 39 Mulyoharjo	Kec Pemalang			PPKD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BPKAD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Adapun tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah *"Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial"*. Sedangkan Visi Pembangunan nasional yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 adalah *"Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"*. Untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 9 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, presiden Republik Indonesia memberikan arahan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan Kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, Visi Provinsi Jawa Tengah adalah ***"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi"***. Sedangkan misi Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2021 diarahkan kepada ***"Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM"***. Arah kebijakan pembangunan ini telah dilakukan penyesuaian dari arah kebijakan ***"Peningkatan Kesejahteraan dan Perekonomian***

Masyarakat didukung Penguatan Daya Saing SDM. Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah tersebut dijabarkan pada arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi daerah dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia menuju SDM berdaya saing.
4. Penguatan Ketahanan Bencana.
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kodusivitas Wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Arah kebijakan pembangunan tahunan dirumuskan secara adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Terjadinya wabah covid 19 yang dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, memberi dampak sangat signifikan kepada kesejahteraan masyarakat. Hal ini disikapi dengan penyesuaian perumusan kebijakan pembangunan pada Tahun 2021. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pembangunan di Kabupaten Pemalang pun disesuaikan menjadi **"Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas"** dimana arah kebijakan sebelumnya adalah "Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas menuju Pemalang Sejahtera".

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan untuk mendukung salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah. Berdasarkan misi tersebut, Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang diupayakan untuk mendukung peningkatan pengelolaan keuangan

daerah yang akuntabel dan transparan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia;
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja ASN di BPKAD;
- d. Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan aset daerah dan pendapatan jasa giro/bunga deposito;
- e. Meningkatkan Akurasi Pengelolaan Aset Daerah yaitu penyajian data pada Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan data aset yang dikuasai dan Neraca Daerah.
- f. Meningkatkan pengamanan aset khususnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- g. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Ekuitas (LE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kabupaten Pemalang, agar dapat dipertahankan hasil opini BPK RI "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" yang telah diraih 3 tahun berturut-turut.

3.4. Tujuan dan Sasaran Renja BPKAD

3.4.1. Tujuan BPKAD

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yaitu *"Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah"*

Tujuan BPKAD tersebut menjadi pedoman dalam menyusun renja agar semua program dan kegiatan yang tercantum pada Renja BPKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Memperkuat eksistensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai lembaga yang berkualitas, berkompeten dan meningkatkan kapabilitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

2. Meningkatkan disiplin dan mengembangkan kemampuan ASN BPKAD dalam memberikan pelayanan yang prima;
3. Memberikan pedoman dan koridor bagi unsur pelaksana program dan kegiatan dalam menjalankan program dan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung program yang tercantum pada RPJMD.

3.4.2. Sasaran BPKAD

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategik. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Sasaran yang ingin dicapai oleh BPKAD adalah *"Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"*

Sasaran BPKAD menjadi titik fokus penyusunan program dan kegiatan BPKAD yang tercantum dalam Renja, agar semua program dan kegiatan dapat mendukung tercapainya sasaran BPKAD tersebut.

Ada pun sasaran Renja BPKAD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya *human performance* (kemampuan dan kemauan aparatur) dalam meningkatkan produktifitas kinerja;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan target capaian Hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) "

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategik, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencermatan terhadap lingkungan strategis yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana kerja khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran.

3.5. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Tahun 2021 merupakan kegiatan regular yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari 6 Program dengan 65 kegiatan. Kegiatan yang mendukung program pada RPJMD yang belum masuk pada program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPKAD digeser ke program yang sesuai agar lebih mudah mengelompokkan kegiatan-kegiatan pendukung program pada RPJMD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPKAD

4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel :3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Rencana 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebudayaan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebudayaan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					9.220.500.000				9.220.500.000
4 04	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan					9.220.500.000				9.220.500.000
4 04 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			12 bulan	2.652.000.000			12 bulan	2.652.000.000
4 04 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat/notdin yang masuk dan yang terkirim dalam satu tahun	BPKAD		7.800 surat/notdin	30.000.000	APBD		7.800 surat/notdin	30.000.000
4 04 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, air, listrik dan internet yang dibayar dalam satu tahun	BPKAD		4 jenis	725.000.000	APBD		4 jenis	725.000.000
4 04 1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah EMD Milik Pemkab Pemalang yang dijaminan	BPKAD		185 unit	830.000.000	APBD		185 unit	830.000.000
4 04 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diproses perijinannya	BPKAD		53 Unit	22.000.000	APBD		53 Unit	22.000.000
4 04 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukan PA, KPA dan Bendahara yang disusun selama satu tahun Jumlah Laporan Belanja Langsung BPKAD yang disusun selama setahun Jumlah kegiatan Publikasi data, informasi dan kegiatan melalui Website BPKAD yang dilaksanakan selama setahun	BPKAD		18 SK Bupati, 12 laporan, 4 kegiatan	90.000.000	APBD		18 SK Bupati, 12 laporan, 4 kegiatan	90.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Proyeksi Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4 04 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan, Keindahan, Kebersihan dan Kerapuhan kantor selama satu tahun	BPKAD	4 orang	85.000.000	APBD		4 orang	85.000.000
4 04 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama satu tahun	BPKAD	5 unit	15.000.000	APBD		5 unit	15.000.000
4 04 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dilaksanakan pengadaannya selama satu tahun	BPKAD	30 Jenis	90.000.000	APBD		30 Jenis	90.000.000
4 04 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang dilaksanakan pengadaannya selama satu tahun	BPKAD	11 jenis	50.000.000	APBD		11 jenis	50.000.000
4 04 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor BPKAD dan jasa perbaikan jaringan listrik yang dilaksanakan selama satu tahun	BPKAD	12 kegiatan	10.000.000	APBD		12 kegiatan	10.000.000
4 04 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama satu tahun	BPKAD	5 unit	150.000.000	APBD		5 unit	150.000.000
4 04 1 15	Penyediaan bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bahan yang disediakan selama satu tahun	BPKAD	2 Jenis	15.000.000	APBD		2 Jenis	15.000.000
4 04 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jenis makanan & minuman yang disediakan selama satu tahun	BPKAD	4 jenis	120.000.000	APBD		4 jenis	120.000.000
4 04 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam & ke luar daerah	Jumlah jenis perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke dalam atau ke luar daerah yang dilaksanakan selama satu tahun	BPKAD	2 jenis	450.000.000	APBD		2 jenis	450.000.000
4 04 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKAD	100%	1.052.000.000	APBD		100%	1.052.000.000
4 04 2 5	Penyediaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua untuk operasional BPKAD yang dilaksanakan pengadaannya dalam satu tahun	BPKAD	4 unit	100.000.000	APBD		4 unit	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4 04 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dilaksanakan pengadaannya	BPKAD	4 unit	32.000.000	APBD		4 unit	32.000.000
4 04 2 9	Pengadaan Perawatan Gedung Kantor	Jumlah Perawatan Gedung Kantor yang dilaksanakan pengadaannya dalam Satu tahun	BPKAD	2 paket	50.000.000	APBD		2 paket	50.000.000
4 04 2 10	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang dilaksanakan pengadaannya selama satu tahun	BPKAD	8 unit	40.000.000	APBD		8 unit	40.000.000
4 04 2 11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dilaksanakan pengadaannya	BPKAD	10 unit	200.000.000			10 unit	200.000.000
4 04 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit Gedung yang dilaksanakan pemeliharaannya selama satu tahun	BPKAD	2 unit	250.000.000	APBD		2 unit	250.000.000
4 04 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	50.000.000
4 04 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	52 unit	120.000.000	APBD		52 unit	120.000.000
4 04 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	10 unit	20.000.000	APBD		10 unit	20.000.000
4 04 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	1 unit	15.000.000	APBD		1 unit	15.000.000
4 04 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebel	Jumlah mebel yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	1 kegiatan	5.000.000	APBD		1 kegiatan	5.000.000
4 04 2 30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	20 unit	20.000.000	APBD		20 unit	20.000.000
4 04 2 38	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengelolan aset daerah	Jumlah unit gedung kantor aset milik pemerintah yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	1 unit	120.000.000	APBD		1 unit	120.000.000
4 04 2 45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jumlah software dan sistem informasi yang dipelihara selama satu tahun	BPKAD	2 sistem aplikasi	30.000.000	APBD		2 sistem aplikasi	30.000.000
4 04 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKAD	100%	320.000.000	APBD		100%	320.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Paga Indefinitif	Sumber Dana	Catatan Penting	TARGET CAPAIAN KINERJA	Kebutuhan Dana/ Paga Indefinitif
			4	6	7	8	9	10	11
4 04 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah personal yang dikirim untuk mengikuti Bintel/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diklat	4	70 orang	320.000.000	APBD		70 orang	320.000.000
4 04 6 1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	BPKAD	100%	346.500.000	APBD		100%	346.500.000
4 04 6 2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan diklasifikasi realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah Perjanjian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja Tahun 2021 yang disusun	BPKAD	17 dokumen	16.000.000	APBD		17 dokumen	10.000.000
4 04 6 3	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen pendukung SAKIP 2020 yang disusun	BPKAD	3 dokumen	5.500.000	APBD		2 dokumen	5.500.000
4 04 6 4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah LKJP BPKAD yang disusun	BPKAD	4 dokumen	20.000.000			4 dokumen	20.000.000
4 04 6 5	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran konsolidasi	Jumlah laporan keuangan BPKAD dan PPKD akhir tahun yang disusun	BPKAD	14 dokumen	50.000.000	APBD		14 dokumen	50.000.000
4 04 6 7	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun konsolidasi	Jumlah laporan keuangan Daerah semesteran konsolidasi dan prognostiknya yang disusun	BPKAD	3 dokumen	161.000.000			3 dokumen	161.000.000
4 04 6 8	Penyusunan rekonsiliasi data pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah laporan realisasi pendapatan bulanan dan realisasi belanja bulanan hasil rekonsiliasi yang disusun	BPKAD	48 laporan	80.000.000	APBD		48 laporan	80.000.000
4 04 6 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan evaluasi RKPD Triwulanan yang disusun Jumlah Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Jumlah Laporan Realisasi Fisik Kegiatan yang disusun Jumlah rekomendasi BPK atas temuan	BPKAD	20 dokumen	20.000.000	APBD		20 dokumen	20.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Berencana)					Prakiraan Meju Berencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
		penyusunan yang ditindaklanjuti							
4 04 9	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran PD	BPKAD	100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000
4 04 9 2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah Renstra dan Renja BPKAD Jumlah RKA/RKAP dan DPA/DIPA BPKAD/PPKD	BPKAD	13 dokumen	30.000.000	APBD		13 dokumen	30.000.000
4 04 15	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Ketepatan waktu penyampaian RKA SKPD - Persentase Ketepatan waktu penyusunan SPD - Persentase Ketepatan waktu pencairan dana - Persentase pengamanan aset daerah - Persentase pemindahtanganan aset daerah - Persentase Ketepatan waktu penyusunan laporan BMD - Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Semester pertama - Persentase Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah 	BPKAD	<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 90% 60% 100% 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 4.820.000.000 	APBD		<ul style="list-style-type: none"> 100% 100% 100% 90% 60% 100% 100% 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 4.820.000.000
4 04 15 3	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah	Jumlah Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang disahkan	BPKAD	1 perbup	45.000.000	APBD		1 perbup	45.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Pencapaian Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatif	Sumber Dana	Capaian Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
4 04 15 4	Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Perbup tentang pedoman pelaksanaan APBD yang disusun	BPKAD	1 Perbup	170.000.000	APBD		1 Perbup	170.000.000
4 04 15 6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah Raperda tentang APBD yang disusun		1 dokumen	400.000.000			1 dokumen	400.000.000
4 04 15 7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang disusun	BPKAD	1 dokumen	90.000.000	APBD		1 dokumen	90.000.000
4 04 15 8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda tentang Perubahan APBD yang disusun		1 dokumen	400.000.000			1 dokumen	400.000.000
4 04 15 9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran, Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	BPKAD	1 dokumen	90.000.000	APBD		1 dokumen	90.000.000
4 04 15 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	BPKAD	1 dokumen	380.000.000			1 dokumen	380.000.000
4 04 15 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD yang disusun	BPKAD	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	75.000.000
4 04 15 15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah kegiatan Bimtek/Sosialisasi pengelolaan keuangan daerah kepada pengelola keuangan SKPD yang dilaksanakan	BPKAD	1 kegiatan	150.000.000	APBD		1 kegiatan	150.000.000
4 04 15 16	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pematang	Jumlah sertifikat tanah aset daerah dan pemasangan papan identitas aset daerah yang dilaksanakan	BPKAD	40 sertifikat, 96 papan identitas	215.000.000	APBD		40 sertifikat, 96 papan identitas	215.000.000
4 04 15 21	Penyusunan PBB Aset Daerah / Barang Milik Daerah	Jumlah PBB tanah aset milik Pemkab Pematang yang dibayar	BPKAD	78 dokumen	40.000.000	APBD		78 dokumen	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Prairaan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4 04 15 22	Pendistribusian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pendistribusian BMD yang dilaksanakan selama satu tahun	BPKAD	3 laporan	10.000.000	APBD		3 laporan	10.000.000
4 04 15 23	Penetapan status pengguna BMD, SK Pengurus barang RKEU dan RKEU	Jumlah Keputusan Duplikat tentang penunjukkan pengurus barang yang disusun Jumlah SK Penetapan status pengguna BMD, RKBMD dan RSPBMD yang disusun selama satu tahun	BPKAD	5 Dokumen	75.000.000	APBD		5 Dokumen	75.000.000
4 04 15 24	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Semesteran BMD dan Laporan Rekonsiliasi BMD	BPKAD	4 laporan	10.000.000	APBD		4 laporan	10.000.000
4 04 15 25	Penyelesaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Jumlah laporan pemindahtanganan dan penghapusan BMD yang disusun dalam satu tahun	BPKAD	2 laporan	75.000.000	APBD		2 laporan	75.000.000
4 04 15 26	Penyusunan laporan realisasi penerimaan BPKAD	Jumlah laporan realisasi penerimaan BPKAD yang disusun dalam satu tahun	BPKAD	12 laporan	5.000.000	APBD		12 laporan	5.000.000
4 04 15 31	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah	BPKAD	1 dokumen	50.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
4 04 15 35	Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada SKPD	BPKAD	30 laporan	60.000.000	APBD		30 laporan	60.000.000
4 04 15 54	Pengelolaan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan penyelesaian kerugian daerah atas hasil temuan pengawasan	BPKAD	2 laporan	50.000.000	APBD		2 laporan	50.000.000
4 04 15 56	Pemantauan, Pemanfaatan aset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Aset Daerah	BPKAD	4 laporan	70.000.000	APBD		4 laporan	70.000.000
4 04 15 57	Penyusunan laporan semesteran barang milik daerah (konsolidasi)	Jumlah Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi) yang disusun	BPKAD	1 laporan	165.000.000	APBD		1 laporan	165.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PANGI INDIKATIF	SUMBER DANA	CABUTAN PENTING	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PANGI INDIKATIF
4	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4 04 15 58	Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Laporan Mutasi Deposito	BPKAD	24 laporan	70.000.000	APBD		24 laporan	70.000.000
4 04 15 59	Penyusunan Bahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PFAS	Jumlah Laporan Rancangan KUA PFAS selama satu tahun	BPKAD	2 laporan	80.000.000	APBD		2 laporan	80.000.000
4 04 15 62	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk SKPD	BPKAD	4 unit	1.000.000.000	APBD		4 unit	1.000.000.000
4 04 15 64	Penerbitan SP2D Belanja Langsung dan Pengeluaran Pembayaran	Jumlah SP2D Belanja Langsung dan Pembayaran yang diterbitkan	BPKAD	2.500 dokumen	100.000.000	APBD		2.500 dokumen	100.000.000
4 04 15 65	Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan	BPKAD	3.500 dokumen	150.000.000	APBD		3.500 dokumen	150.000.000
4 04 15 66	Penyusunan Dokumen Penghentian Pembayaran Gaji PNSD	Jumlah dokumen Penghentian pembayaran gaji PNSD	BPKAD	500 dokumen	25.000.000	APBD		500 dokumen	25.000.000
4 04 15 67	Penyusunan dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	Jumlah dokumen pendukung pembayaran gaji PNSD	BPKAD	12.400 dokumen	140.000.000	APBD		12.400 dokumen	140.000.000
4 04 15 68	Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset Daerah	Jumlah kegiatan peningkatan kompetensi pengelola aset daerah yang dilaksanakan	BPKAD	2 kegiatan	175.000.000	APBD		2 kegiatan	175.000.000
4 04 15 69	Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah	Jumlah aplikasi yang dibuat dalam rangka peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah	BPKAD	1 aplikasi	300.000.000	APBD		1 aplikasi	300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
4 04 15 70	Penyusunan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil dan LKT	Jumlah laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi, Jumlah Laporan Realisasi Dana Transfer dari pusat (LKT)	BPKAD	16 laporan	40.000.000	APBD		16 laporan	40.000.000
4 04 15 71	Penyusunan laporan realisasi penerimaan PPKD, Pengeluaran PPKD dan Pembayaan	Jumlah laporan penerimaan PPKD dan Penerimaan Pembayaan Jumlah Laporan Realisasi Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD, Jumlah berkas pengajuan pencairan DTL PPKD dan Pembayaan yang diverifikasi	BPKAD	2.849 dokumen	75.000.000	APBD		2.849 dokumen	75.000.000
4 04 15 72	Penerbitan SPD dan Anggaran Kas	Jumlah SPD dan Anggaran kas Perangkat Daerah yang diterbitkan	BPKAD	300 dokumen	40.000.000	APBD		300 dokumen	40.000.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 ini merupakan pedoman bagi BPKAD dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2021. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD serta misi Pemerintah Kabupaten Pematang 2016 -2021 serta mempedomani regulasi pengelolaan keuangan daerah terbaru yaitu Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Tahun 2021 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020. Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat penyesuaian kegiatan agar sinkron dengan program sehingga kegiatan pendukung program yang tercantum pada RPJMD yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada pada satu kelompok program. Selain itu mapping program dan kegiatan disesuaikan dengan nomenklatur yang tercantum pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 merupakan langkah-langkah lanjutan terhadap Renja sebelumnya dengan harapan dapat tercapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra serta sejalan dengan RKPD yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Pematang 2016-2021.

Pematang, 10 Agustus 2020

Kepala BPKAD Kabupaten Pematang



Drs. M. A. PUNTODEWO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

MAPPING PROGRAM KEGIATAN KE PROGRAM KEGIATAN DI BPKAD SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ISI KEGIATAN	PROGRAM PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90	KODE REKENING	KETERANGAN
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Masuk & Surat Keluar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa surat Menyurat	5 02 01 2.03 01	
2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Air, Telephone, Internet dan Cloud	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 02 01 2.03 02	
3	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Jaminan BMD	Auransi Kendaraan dinas Roda 4 dan Alat Berat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Jaminan BMD	5 02 01 2.03 05	
4	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	Pengurusan Perpanjang STNK Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	5 02 01 2.03 06	
5	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyusunan Keputusan Bupati tentang PA/PPA dan Bendahara, Penyusunan Laporan Realisasi Belanja Langsung dan Publikasi Informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5 02 01 2.03 07	Publikasi Informasi dan Pelayanan Pengaduan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 02 02 3.02 02	Penyusunan Keputusan Bupati tentang PA/PPA/Bendahara SKPD dan SK Bendahara BOS SD dan SKMP
6	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembelian Peralatan Kebersihan dan Jasa Pelebaran Kebersihan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 02 01 2.03 08	

7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Perlatan Kerja	Pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 02 01 2.03 09
8	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan alat Tulis Kantor	5 02 01 2.03 10
9	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 02 01 2.03 11
10	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembayaran Jasanya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 02 01 2.03 12
11	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 02 01 2.03 13
12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Membiayai Biaya Bertanggungjawab Surat Kabar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 02 01 2.03 15
13	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya Makan Minum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	5 02 01 2.03 17
14	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 02 01 2.03 18
						Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.????	

15	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer Daerah	Menyusun Laporan Realisasi Dana Transfer dan Laporan Realisasi Dana Bagi Hasil Propinsi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 02 02 2.02 03		
16	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PPKD dan Pembiayaan	Menyusun Laporan Realisasi Penerimaan PPKD dan Menyusun Laporan Realisasi Belanja Tidak Langsung PPKD, Menyusun Laporan Penyaluran Dana Dasa dari RKUD ke BKD dan Verifikasi Berkas Pencairan PPKD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 02 02 2.03 02		Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PPKD, Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD
17	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Perbendaharaan	Menyusun SP2D BL dan BTL	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan, Penerimaan dan Pendistribusian Lembar SP2D	5 02 02 2.02 04		
18	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Dana dan Anggaran Kas	Menyusun SP2D dan Anggaran Kas	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Fasilitasi atas SP2D dengan Instansi Terkait	5 02 02 2.02 08		
19	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan Gaji	Menyusun SKPP	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemboran Pembinaan Rincian Penggunaan atas Penghasilan SPS Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	5 02 02 2.02 05		

20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan Kendaraan dinas Roda 2 untuk BPKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5 02 01 2.03	20
21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	5 02 01 2.03	21
22	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 02 01 2.03	24
23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Meubelur	Pengadaan Meubelur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Meubelur	5 02 01 2.03	25
24	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Komputer dan Perengkapannya	Pengadaan Komputer dan perengkapannya					Digabung dengan Sub Kegiatan 5.02.01.2.03.13
25	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5 02 01 2.03	28
26	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pemeliharaan Mobil Kepala BPKAD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5 02 01 2.03	29

27	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	5 02 01 2.03 30	
28	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perengkapan Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	5 02 01 2.03 32	
29	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 02 01 2.03 34	
30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelur	Pemeliharaan Meubelur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelur	5 02 01 2.03 35	
31	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Perengkapannya	Pemeliharaan Komputer dan Perengkapannya	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	5 02 01 2.03 03	
32	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software dan Sistem Informasi	Pemeliharaan Sistem Informasi						Digabung dengan Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.10
33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Pengiriman Peserta Workshop/Seminar/Diklat/ Bimtek	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5 02 01 2.04 10	

34	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN)	Penyusunan Ujib, Penyusunan PK dan RKT, Penyusunan SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerjanya	5 02 01 2.02 06	LK/IP, SAKIP, PK dan NKT
35	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	5 02 01 2.02 07	Laporan Keuangan Semesteran/Bulanan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 02 01 2.02 08	Laporan Prognosis
36	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyusunan LRPD dan Penyusunan LRPJ	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 02 01 2.02 09	Laporan Keuangan Akhir Tahun BPKAD
37	PROGRAM PENGINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi	PROGRAM PECELAAN KEUANGAN DALAM DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	5 02 02 2.03 05	Laporan Semesteran Konsolidasi dan LKD

51	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Rencana Bendahara dan PPK SKPD	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2.04 11	
52	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pemalang	Sertifikasi Tanah Milik Perseorangan dan Pembuat Papan Identitas Tanah Milik Perseorangan	PROGRAM Pengelolaan Barang Milik Daerah	Hingga Daerah Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	5 02 03 2.01 07	Sertifikasi Tanah, Pembuatan Papan Identitas Tanah Milik Perseorangan, Pembayaran PBB
53	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS	Penyusunan Dokumen Pendukung Pembayaran Gaji PNS (Lembar, SP2D Gaji, Rekap LPP dll)	PROGRAM Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pajak Ketiga (PPK)	5 02 02 2.02 05	Penyusunan Dokumen Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Posisi Kas/PPK
54	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembayaran PBB aset Daerah/BMD	Pembayaran PBB Aset Milik Perseorangan					Digabung dengan sub kegiatan 5.02.03.2.01.07
55	PROGRAM Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pembayaran Barang Milik daerah (BMD)	Pelaksanaan Distribusi BMD ke SKPD					Digabung dengan Sub Kegiatan 5.02.03.2.01.10

56	PROGRAM Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Status Pembina BMD, SK Pengurus Barang, REGLU dan REGRU	Penyusunan SK Pengurus Barang, Penyusunan Barang, Pengguna Barang, Penyusunan RKBMD dan RKBMD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kelembagaan BMD	5 02 03 2.01 03	RKBMD, RKBMD
57	PROGRAM Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Semesteran BMD BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Revisibilitas dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	5 02 03 2.01 11	Laporan BMD Semesteran dan Akhir Tahun
58	PROGRAM Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Peminangan dan Penghapusan BMD	Pelaksanaan Lelang dan Penghapusan BMD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pencapaian atas Peminangan BMD	5 02 03 2.01 10	Peminangan dan Pembentukan BMD
59	PROGRAM Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	Penyusunan Laporan Penerimaan BPKAD					Digabung dengan Sub Kegiatan 5.02.02.2.03.02
60	PROGRAM Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	5 03 02 2.03 10	Penyusunan Manual Book dan Perbaikan Sistem Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Peminangan Software Sistem Informasi

61	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pendampingan kepada SKPD tentang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah	5 02 03 2.03 10		
62	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Kerugian Daerah	Penyusunan Perbup TGR dan Monitoring TP/TGR						Digabung dengan Sub Kegiatan 5.02.03.2.02.07.
63	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Sosialisasi/Peningkat an SDM/Pengurus Barang/Simda BMD	Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi kepada Pengurus Barang, Pemerintahan Subim Informasi BMD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD	5 02 03 2.01 13		Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan BMD
64	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemantauan, pemanfaatan HRU/BMD	Pelaksanaan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	5 02 03 2.01 09		Lelang BMD dan Monitoring Pemanfaatan BMD
65	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Laporan Semesteran BMD (Konsolidasi)	Penyusunan Laporan BMD Semesteran	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari SKPD	5 02 03 2.01 12		Laporan BMD Konsolidasi

66	PROGRAM PENGINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Kas Daerah	Penyusunan Laporan Mutasi Deposito dan Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 02 02 2.02 01	01	Laporan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah (Koordinasi DAU, DAK)
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Koordinasi pelaksanaan Putang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 02 02 2.02 07	07	Laporan Realisasi Perencanaan Anggr, Budget dan Laporan Mutasi Deposito dan Laporan Terkait TP/TGR
67	PROGRAM PENGINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan bahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Perubahan Anggaran dan PPAS	Penyusunan Laporan Rancangan Anggaran sebagai bahan PPAS	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 02 02 2.01 09	09	Laporan Perencanaan Anggaran Pendapatan sebagai bahan KUA PPAS
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 02 02 2.01 10	10	Laporan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah sebagai bahan KUA PPAS
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 02 02 2.01 11	11	Laporan Perencanaan Anggaran Pembiayaan sebagai bahan KUA PPAS
68	PROGRAM PENGINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional SKPD oleh SKPD	Pengadaan Kendaraan Dinas oleh SKPD untuk SKPD dan Lembaga Masyarakat	PROGRAM PENJUANG LIBUSAN PMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Mobil Jabatan	5 02 01 2.03 19	19	

LAMPIRAN II

TABEL PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR SUB KEGIATAN DAN PPTK PADA BPKAD TAHUN 2021

NO	PROGRAM PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PERMENDAGRI 90	SUB KEGIATAN PERMENDAGRI 90	KODE REKENING	Indikator	PELAKSANA KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	5 02 01 2,01 01	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah.	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan	5 02 01 2,01 02	Jumlah RKA/RKAP/DPA/DPPA Perangkat Daerah	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat daerah	5 02 01 2,01 03	Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Perangkat Daerah Triwulanan	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 02 01 2,01 05	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran dan Fisik Kegiatan Perangkat Daerah	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5 02 01 2,02 01	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	KASUBID BELANJA TIDAK LANGSUNG
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5 02 01 2,02 05	Jumlah Dokumen dan laporan sebagai bahan tanggapan pemeriksaan	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN

6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	5 02 01 2.02 06	- Jumlah LKJP Perangkat Daerah - Jumlah Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan - Jumlah Laporan Realisasi Kinerja triwulanan - Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang tersusun	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	5 02 01 2.02 07	- Jumlah Laporan Keuangan Semesteran perangkat daerah yang tersusun - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Perangkat Daerah - Laporan BMD Semesteran dan Rekonsiliasi BMD	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 02 01 2.02 08	- Jumlah Laporan Prognosis Perangkat Daerah	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 02 01 2.02 09	- Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah - Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa surat Menyurat	5 02 01 2.03 01	- Jumlah surat masuk, surat keluar, nota dinas dan dokumen surat menyurat lainnya yang tercatat dan terdistribusi secara tertib selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 02 01 2.03 02	- Jumlah kebutuhan Air, Telephone, Listrik, Internet dan Cloud selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	5 02 01 2,03 03	- Jumlah perelatan dan perlengkapan kantor yang terlaksana pemeliharannya selama setahun	KASUBAG ANALISA DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Jamiran BMD	5 02 01 2,03 05	- Jumlah alat berat dan kendaraan dinas roda empat yang diamankan selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	5 02 01 2,03 06	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 milik BPKAD yang difasilitasi perijinannya	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5 02 01 2,03 07	- Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan PA/KPA/Bendahara - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang - Jumlah Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara BOS	KASUBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5 02 01 2,03 08	- Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (K3 dan alat alat kebersihan) yang tersedia selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 02 01 2,03 09	- Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Service Komputer, printer, laptop, mesin foto copy dll) yang terlaksana selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan alat Tulis Kantor	5 02 01 2,03 10	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 02 01 2,03 11	Jumlah barang cetakan yang tersedia selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 02 01 2,03 12	Jumlah Jasa Perbaikan Instalasi Listrik dan Pembelian Alat Penerangan yang terlaksana sela setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 02 01 2,03 13	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (bendera, white board, mesin ketik, mesin fax, mesin foto copy serta termasuk pengadaan komputer dan Perengkapannya) yang terlaksana selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 02 01 2,03 15	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Blaya Berlangganan Surat Kabar/Majalah dan pembelian buku-buku referensi/regulasi untuk keperluan dinas) yang terlaksana selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	5 02 01 2,03 17	- Jumlah kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman yang terlaksana selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 02 01 2,03 18	- Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana dalam rangka koordinasi dan konsultasi selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Mobil Jabatan	5 02 01 2,03 19	- Jumlah Pengadaan Mobil untuk Operasional pejabat pada Perangkat Daerah	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	5	02	01	2,03	20	- Jumlah Pengadaan Motor untuk operasional BPKAD	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	5	02	01	2,03	22	- Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Korden, Lambung Garuda, Bendera, papan pengumuman dll) yang terlaksana selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5	02	01	2,03	24	- Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Pengadaan CCTV, AC, Genset, penangkal petir dll) selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pengadaan Meubelur	5	02	01	2,03	25	- Jumlah Pengadaan Meubelur selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5	02	01	2,03	28	- Jumlah Gedung Kantor yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	5	02	01	2,03	29	- Jumlah Mobil Kepala Perangkat Daerah yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	5	02	01	2,03	30	- Jumlah Mobil dan Motor Dinas perangkat daerah yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	5	02	01	2,03	32	Jumlah perlengkapan gedung kantor (Laundry Korden, Bendera, perbaikan papan nama instansi, perbaikan Papan DUK dll) yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	5 02 01 2,03 34	Jumlah perulatan gedung kantor (AC, CCTV, Genset, Pemangkal Petir dll) yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
35	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur	5 02 01 2,03 35	- Jumlah Meubeleur yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2,04 10	- Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang terlaksana Jumlah ASN yang mengikuti Bintelk/Seminar/Workshop/Diklat	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMDA	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2,04 11	- Jumlah personil pengelola keuangan pada perangkat daerah yang mengikuti Bintelk	KASUBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
38	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5 02 02 2,01 05	Jumlah Raperda APBD dan Perbup Penjabaran APBD yang tersusun	KASUBBID PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN
39	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 02 02 2,01 06	Jumlah Raperda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD yang tersusun	KASUBBID PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN
40	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 02 02 2,01 09	Jumlah Laporan Bahan Perencanaan Anggaran Pendapatan sebagai bahan KUA PPAS tersusun	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN

41	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 02 02 2.01 10	Jumlah Laporan Bahan Perencanaan Anggaran Belanja Daerah sebagai bahan KUA PPAS yang tersusun	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan	5 02 02 2.01 11	Jumlah Laporan Bahan Perencanaan Anggaran Pembinaan sebagai bahan KUA PPAS yang tersusun	KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN
43	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 02 02 2.02 01	Jumlah Laporan Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah (koordinasi terkait DAK Fisik, TPG dll)	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 02 02 2.02 03	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Dana Transfer (LKT) - Tersusunnya Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Propinsi	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
45	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lember SP2D	5 02 02 2.02 04	- Jumlah SP2D Belanja Langsung dan Pembinaan yang diterbitkan selama setahun	KASUBBID BELANJA LANGSUNG
46	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan atas Pengesahan SRJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	5 02 02 2.02 05	- Jumlah SP2D Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan selama setahun - Jumlah SKPP (Dokumen Penghentian Gaji PNSD) yang diterbitkan selama setahun - Jumlah dokumen pendukung pembayaran Gaji PNSD (Ledger Gaji dll) yang diterbitkan selama setahun	KASUBBID BELANJA TIDAK LANGSUNG

47	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5 02 02 2,02 06	- Jumlah Laporan Posisi Kas - Jumlah Laporan pemotongan/pemungutan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga (PFK) Jumlah Laporan Hasil Monitoring TP/TGR Laporan Realisasi Penerimaan BPKAD	KASUBID BELANJA LANGSUNG
48	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Pertempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 02 02 2,02 07	- Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Jajgir dan Bunga Deposito - Jumlah Laporan Mutasi Deposito	KASUBID BELANJA TIDAK LANGSUNG
49	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5 02 02 2,02 08	Tersusunnya Laporan hasil Monitoring TP/TGR	KASUBID BELANJA LANGSUNG
50	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	5 02 02 2,02 09	Jumlah perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD yang tersusun selama setahun	KASUBID BELANJA LANGSUNG
51	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pelaksanaan Pengendalian dan Pembatasan Anggaran Kas dan SPD	5 02 02 2,02 10	Jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Anggaran Kas peratgkat daerah yang diterbitkan selama setahun	KASUBID PERENCANAAN ANGGARAN

52	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 02 02 2,03 02	- Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran PKD dan Penerimaan Pembayaan - Jumlah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran BPKAD dan Pengeluaran Pembayaan - Jumlah LKPJ perangkat daerah - Jumlah Laporan Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
53	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	5 02 02 2,03 04	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	5 02 02 2,03 05	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Konsolidasi, Laporan Keuangan Bulanan Konsolidasi dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Konsolidasi yang tersusun selama setahun	KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN
55	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Tindakan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atau Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 02 02 2,03 06	Jumlah buku kumpulan dokumen hasil Tindak Lanjut temuan/LHP atas Pemeriksaan BPK RI/Inspektorat Propinsi	KASUBBAG BINA PROGRAM DAN KEUANGAN
56	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembayaan	5 02 02 2,03 07	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Realisasi Belanja, Pendapatan dan Pembayaan	KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN

57	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemda	5 02 02 2,03 09	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi Pemda yang tersusun selama setahun	KASUBBID ANALISA DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda	5 02 02 2,03 10	- Jumlah Manual Book dan Perbup tentang Sistem Informasi Akuntansi - Jumlah Software Sistem Informasi yang terlaksana pemeliharaannya selama setahun - Jumlah aplikasi pendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tersusun selama setahun	KASUBBID ANALISA DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
59	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	5 02 02 2,03 12	Jumlah Personil yang mengikuti Bimtek operasional sistem penyusunan Laporan Keuangan (SIMDA)	KASUBID ANALISA DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM
60	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebaruan BMD	5 02 03 2,01 03	Jumlah RKBMD dan RKPBM yang tersusun selama setahun	KASUBBID ASET DAERAH
61	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum BMD	5 02 03 2,01 07	- Jumlah Seritikal Tanah Pemda yang terlaksana pencribitannya selama setahun - Jumlah Papan Identitas Tanah Milik Pemda yang terlaksana pembuatannya dan terpasang pada lokasi tanah milik pemda selama setahun - Jumlah SPT PBB aset tanah pemda yang terlaksana pembayarannya selama setahun	KASUBBID ASET DAERAH

62	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Penggunaan, Pemantauan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD	5 02 03 2,01 09	- Jumlah Laporan hasil Lelang BMD - Jumlah Laporan hasil Monitoring Pemanfaatan BMD	KASUBSID ASET DAERAH
63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian atas Pemindahtanganan BMD	5 02 03 2,01 10	- Jumlah Laporan hasil Pemindahtanganan dan Pendistribusian BMD	KASUBSID ASET DAERAH
64	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	5 02 03 2,01 11	- Jumlah Laporan rekonsiliasi data aset daerah dalam rangka penyusunan Laporan BMD Konsolidasi - Jumlah Laporan BMD Semesteran Konsolidasi - Jumlah Laporan Bulanan BMD Konsolidasi	KASUBSID ASET DAERAH
65	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari SKPD	5 02 03 2,01 12	- Jumlah Laporan BMD Akhir Tahun Konsolidasi	KASUBSID ASET DAERAH
66	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD	5 02 03 2,01 13	- Jumlah personil yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek pengelola BMD pada perangkat daerah	KASUBSID ASET DAERAH